



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



**PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN
(Food Security And Vulnerability Atlas)
KABUPATEN PESISIR BARAT 2023**



KATA PENGANTAR

Dalam pengelolaan program ketahanan pangan masih dibatasi oleh kurangnya informasi yang akurat dan tertata dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menyusun informasi mengenai ketahanan dan kerawanan pangan Tahun 2023 dalam bentuk Peta Kerawanan dan Ketahanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) dalam bentuk Rasio dengan berdasarkan data yang dikeluarkan dari data dari Instansi terkait.

Penyusunan FSVA ini mengacu pada beberapa indikator yang terkait dengan masalah rawan pangan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan tentang informasi lokasi keberadaan kantung-kantung rawan pangan di tingkat desa. Diharapkan dengan adanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dan praktisi pembangunan karena FSVA ini memberikan arah prioritas kebutuhan dan rekomendasi kegiatan secara konkrit. Dengan upaya bersama antar para pemangku kepentingan secara bersama kita merancang strategi dan menjalankan strategi ketahanan pangan secara efektif dengan prioritas utama terhadap masyarakat miskin dan kelompok yang paling rawan pangan.

Kami berharap kerja sama yang berkelanjutan dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen FSVA ini akan kami terima dengan senang hati.

Krui, November 2023

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kab. Pesisir Barat**

UNZIR, S.P

Pembina TK.I/ IV.b

NIP. 19730115 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	4
1.3 Metodologi	9
BAB II. KETERSEDIAAN PANGAN.....	14
2.1 Lahan Pertanian.....	14
2.2 Produksi Pangan.....	17
2.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi	27
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	29
BAB III. AKSES PANGAN.....	32
3.1 Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga.....	32
3.2 Akses Transportasi	35
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan.....	38
BAB IV. PEMANFAATAN PANGAN	39
4.1 Akses Terhadap Air Bersih	39
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan.....	41
4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan	43
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	46
BAB V. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	52
5.1 Kondisi Ketahanan Pangan.....	52
5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	56
BAB VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah pekon. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah pekon. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

4. Indikator pada **aspek ketersediaan pangan** adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada **aspek akses pangan** adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Pekon dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada **aspek pemanfaatan pangan** adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Pekon/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Pekon/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Pekon/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 menunjukkan bahwa pekon rentan pangan terdapat pada Prioritas 2 dan 3 sebanyak 22 Pekon dari 118 Pekon (18,64%) yang terdiri dari 6 Pekon (5,08 %) Pmasuk kedalam Prioritas 2; dan 16 Pekon (13,56%) masuk kedalam Prioritas 3. Wilayah pada prioritas 2 tersebar di 5 pekon pada kecamatan Bangkumat dan 1 Pekon di Kecamatan Ngaras. Sedangkan prioritas 3 tersebar 16 pekon di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Lemong sebanyak 4 Pekon ; Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 1 pekon, Kecamatan Karya Penggawa sebanyak 2 Pekon, Kecamatan Ngaras sebanyak 3 Pekon dan Kecamatan Bangkumat sebanyak 6 Pekon.

7. Karakteristik pekon rentan pangan ditandai dengan (1) Kondisi luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, (2) kurangnya sarana penyedia pangan terhadap jumlah penduduk, (3) Permasalahan dalam tingkat kesejahteraan penduduk, (4) Akses Jalan Penghubung; (5) Akses masyarakat di desa tersebut terhadap kebutuhan air bersih, serta (6) jumlah tenaga medis/kesahatan di pekon tersebut yang belum memadai terhadap jumlah kepadatan penduduk.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan pekon diarahkan pada kegiatan:
 - a. Melakukan Ekstensifikasi Pertanian melalui Pembukaan lahan pertanian baru baik cetak sawah ataupun penggunaan lahan kering serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian bagi petani serta meningkatkan kelembagaan petani.
 - b. Melakukan Intensifikasi Pertanian untuk meningkatkan Produktivitas Pertanian dengan memanfaatkan benih unggul, penggunaan pupuk tepat guna, penggunaan air yang cukup serta melakukan modernisasi pertanian..
 - c. Penggunaan dana Desa di arahkan untuk mendukung Ketahanan Pangan untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan.
 - d. Untuk daerah yang berada di wilayah sulit akses transportasi dapat diberikan subsidi ojek untuk menekan harga pangan di daerah yang sulit dijangkau sehingga harga pangan tidak jauh dari harga pangan di pekon lainnya.
 - e. Terkait jalur transportasi darat yang tidak dapat dilalui sepanjang tahun dapat diarahkan menggunakan transportasi lainnya seperti transportasi laut dengan memberikan subsidi terhadap angkutan laut sehingga distribusi pangan tidak terkendala.

- f. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- g. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- h. Peningkatan akses dan mutu pelayanan tenaga Kesehatan pada seluruh tingkat baik secara individu, keluarga maupun masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan serta 116 desa dan 2 kelurahan dengan total penduduk sebesar 167.339 jiwa yang terdiri dari 86.887 laki-laki dan 80.425 perempuan (Disdukcapil Pesisir Barat, 2022). Kabupaten Pesisir Barat secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa dengan letak astronomis 4°40'0"- 6°0'0" Lintang Selatan dan 103° 30'0"-104° 50'0" Bujur Timur dengan jarak kurang lebih 200 Km dari Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur dan Samudera Hindia yang memiliki wilayah daratan seluas 290.723 ha atau kira-kira 8,39 % dari total luas wilayah Provinsi Lampung dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas $\pm 210 \text{ km}^2$. Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:

1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Termasuk Krui dan Bintuhan.
2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500–3.500 milimeter per tahun atau 140–221 milimeter per bulan. Tinggi curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas:

- a) Curah hujan antara 2500 – 3000 mm per tahun
- b) Curah hujan antara 3000 – 3500 mm per tahun yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat tergantung pada sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 peranannya turun dari 48,75% di tahun 2021 menjadi 46,41% di tahun 2022 (Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan di sektor Ketahanan Pangan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

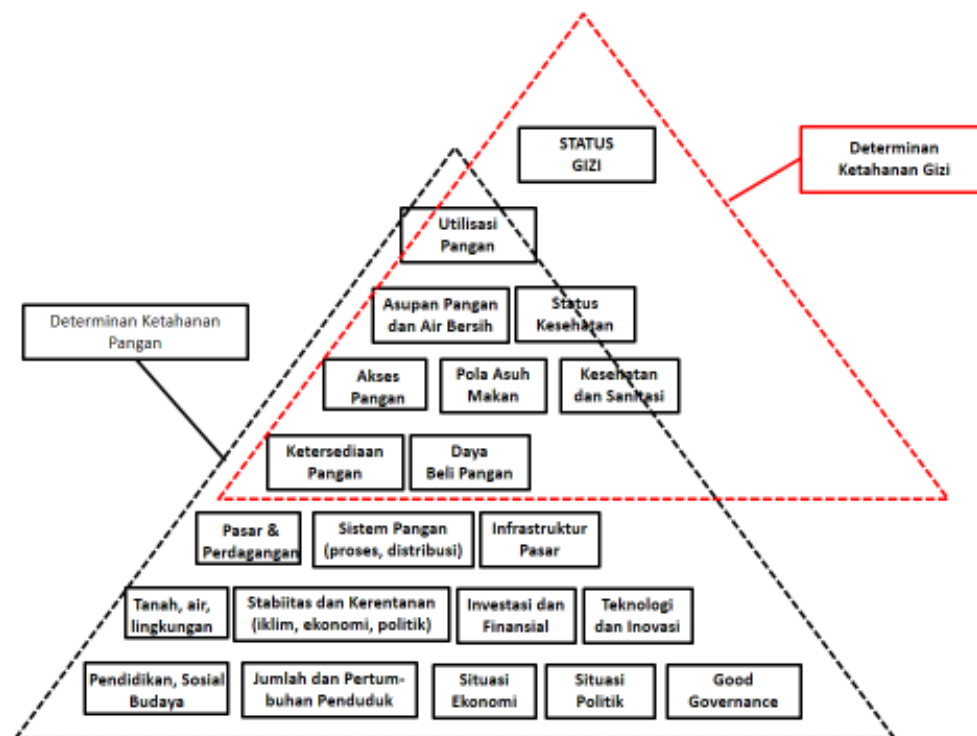
Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*).

Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan

pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan. Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan lainnya.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang

berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

1.3.1 Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa. Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2022 ; DKPP 2022
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2022; Dinas Perdagangan 2022
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kemensos atau Dinas Sosial 2022; Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), 2022
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2022; Dinas Perhubungan 2022; Dinas PUPR 2022
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Beppelitbangda 2022; Dinas Kesehatan 2022
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Dinas Kesehatan 2022; OPD Lainnya yang terkait.

1.3.2 Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
 a_i : Bobot masing-masing indikator
 X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(J) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap

tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 118 Pekon/desa di Kabupaten Pesisir Barat, sebanyak 24 Pekon masuk dalam prioritas 1 (20,34 %) yang tersebar di 6 Kecamatan. Sebanyak 13 Pekon masuk kedalam prioritas 2 (11,01%) yang tersebar di 5 Kecamatan dan 18 Pekon masuk ke prioritas 3 (15,25%) yang tersebar di 7 Kecamatan. Adapun rincian Prioritas 1 sampai dengan 3 adalah sebagai berikut :

a. Rincian Prioritas 1

- Kecamatan Lemong : Pekon Rata Agung dan Suka Mulya
- Kecamatan Pesisir Utara : Pekon Padang Rindu
- Kecamatan Karya Penggawa : Pekon Penggawa Lima Ulu
- Kecamatan Pulau Pisang : Pekon Sukamarga, Pekon Lok, Bandar Dalam, Pasar Pulau Pisang, Sukadana dan Labuhan
- Pekon Way Krui : Pajar Bulan, Sukabaru, Ulu Krui, Gunung Kemala, Labuhan Mandi, Gunung Kemala Timur
- Pekon Pesisir Tengah : Way Redak, Seray, Rawas, Kampung Jawa, Pasar Krui, Pasar Kota Krui, Sukanegara dan Pahmungan

b. Rincian Prioritas 2

- Kecamatan Lemong : Pekon Lemong, Bandar Pugung, Penengahan
- Kecamatan Karya Penggawa : Pekon Way Sindi, Penengahan
- Kecamatan Way Krui : Pekon Bumi Waras, Penggawa Lima, Penggawa Lima Ilir, Banjar Agung
- Kecamatan : Krui Selatan : Pekon Walur, Lintik
- Kecamatan Bangkunan : Pekon Pagar Bukit, Pemerihan

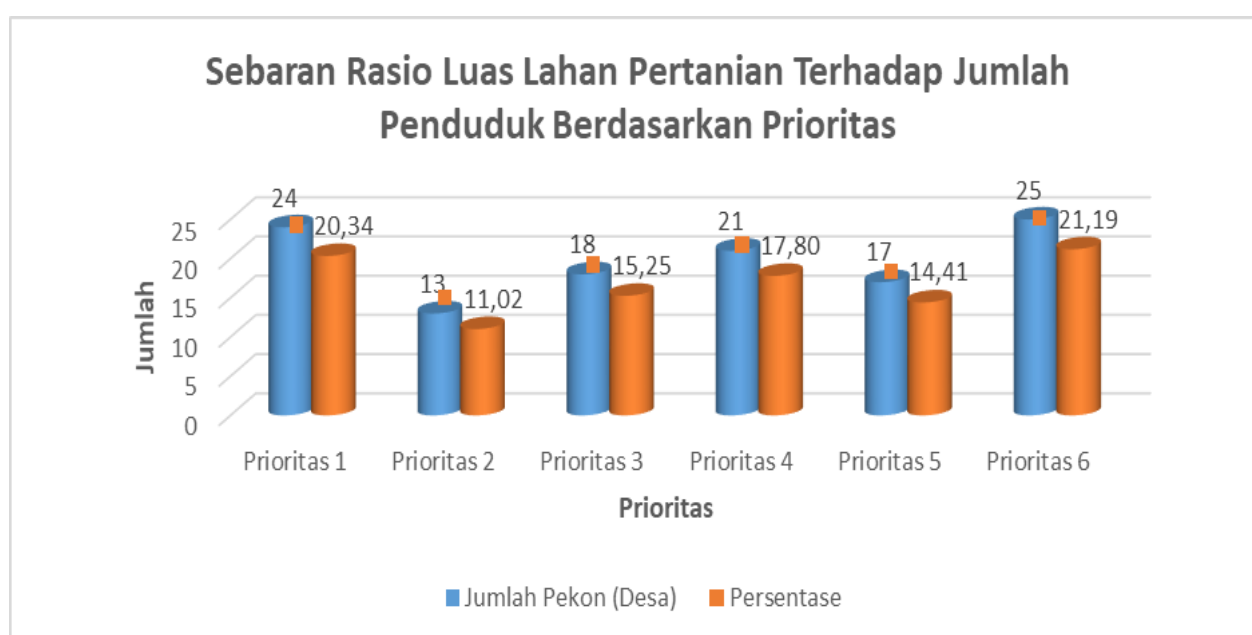
¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

c. Rincian Prioritas 3

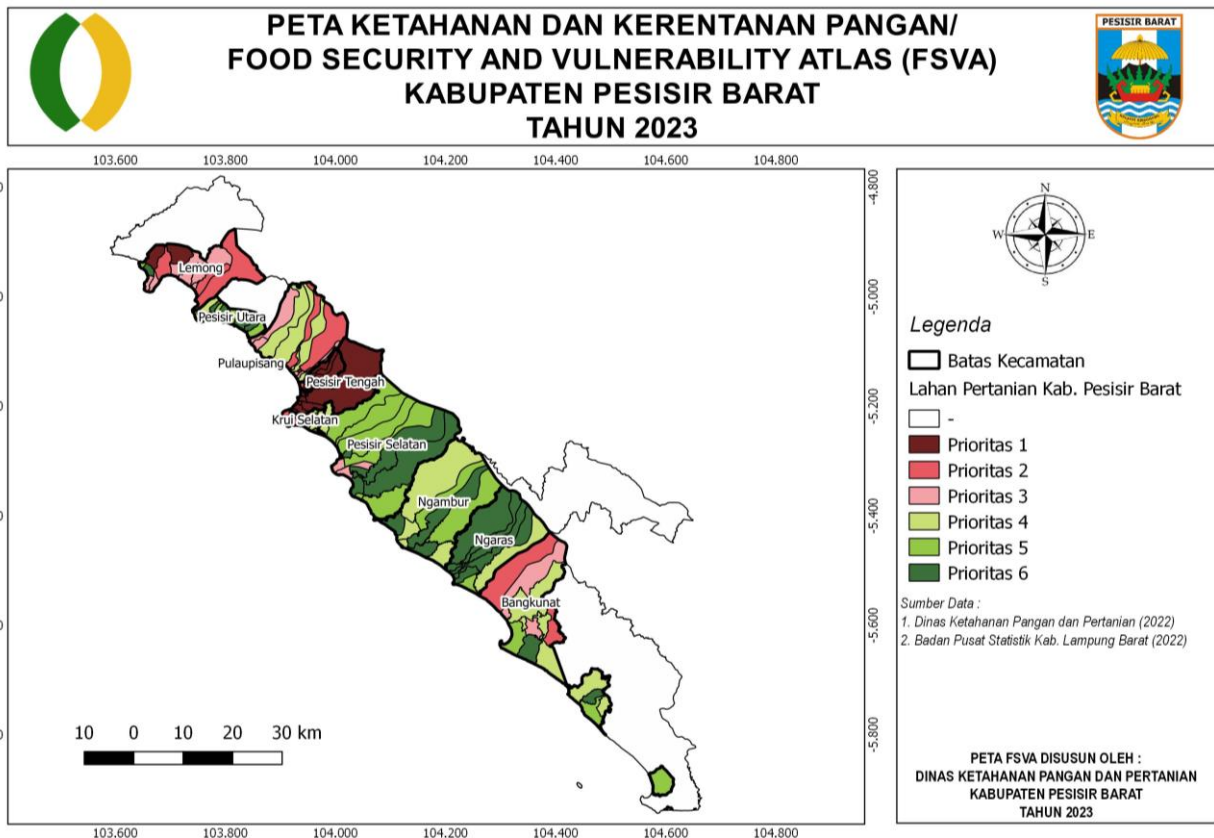
- Kecamatan Lemong : Pekon Way Batang, Cahaya Negeri, Malaya, Pardahaga, Bambang dan Pagar Dalam
- Kecamatan Pesisir Utara : Pekon Kuripan
- Kecamatan Karya Penggawa : Way Sindi Utara, Penggawa Lima Tengah, Asahan Way Sindi dan Laay
- Kecamatan Krui Selatan : Pekon Sukajadi dan Padang Haluan
- Kecamatan Pesisir Selatan : Pekon Biha dan Tanjung Setia
- Kecamatan Ngaras : Pekon Bandar Jaya
- Kecamatan Bangkumat : Pekon Pemerihan dan Tanjung Rejo

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
Prioritas 1	$\leq 0,0292$	24	20,34%
Prioritas 2	0,0292 - 0,0465	13	11,01%
Prioritas 3	0,0465 - 0,0772	18	15,25%
Prioritas 4	0,0772 - 0,1139	21	17,80%
Prioritas 5	0,1139 - 0,1693	17	14,41%
Prioritas 6	$> 0,1693$	25	21,19%
Jumlah		118	100,00%



Gambar 1. Grafik Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian



Gambar 2. Peta Indikator Prioritas Luas Lahan Pertanian

2.2. PRODUKSI PANGAN

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 48,86 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Pesisir Barat yang menyumbang hampir dari total produksi sereal kabupaten Pesisir Barat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata produksi padi dan jagung mencapai 113.153 Ton atau sekitar 96,63%. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, Produksi Padi dan Jagung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

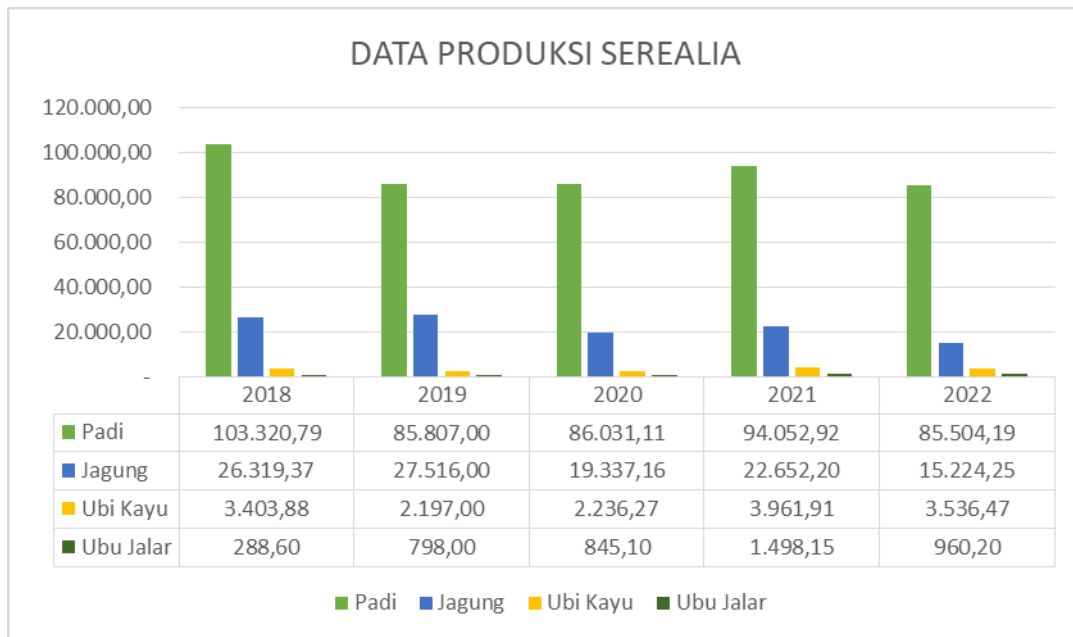
tahun-tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya antara lain banyaknya lahan tegalan yang biasanya dibudidayakan untuk padi ladang dan jagung menjadi komoditi lain seperti pisang dan pepaya. Faktor lainnya adalah berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untuk Pengembangan/Intensifikasi/Ekstensifikasi tanaman jagung dan Padi Ladang.

Sedangkan untuk produksi umbi-umbian di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022 juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam komoditi ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi cukup fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Produksi Serealia dan umbi-umbian di tahun 2022 adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini sangat berdampak pada ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Apalagi penurunan komoditi padi dapat sampai 8.548,73 Ton GKP.

Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022

No	Serealia	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata 5 Tahun
1	Padi	103.320,79	85.807,00	86.031,11	94.052,92	85.504,19	90.943,20
2	Jagung	26.319,37	27.516,00	19.337,16	22.652,20	15.224,25	22.209,80
3	Ubi Kayu	3.403,88	2.197,00	2.236,27	3.961,91	3.536,47	3.067,11
4	Ubu Jalar	288,60	798,00	845,10	1.498,15	960,20	878,01
JUMLAH		133.332,64	116.318,00	108.449,64	122.165,18	105.225,11	117.098,12

Sumber : Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



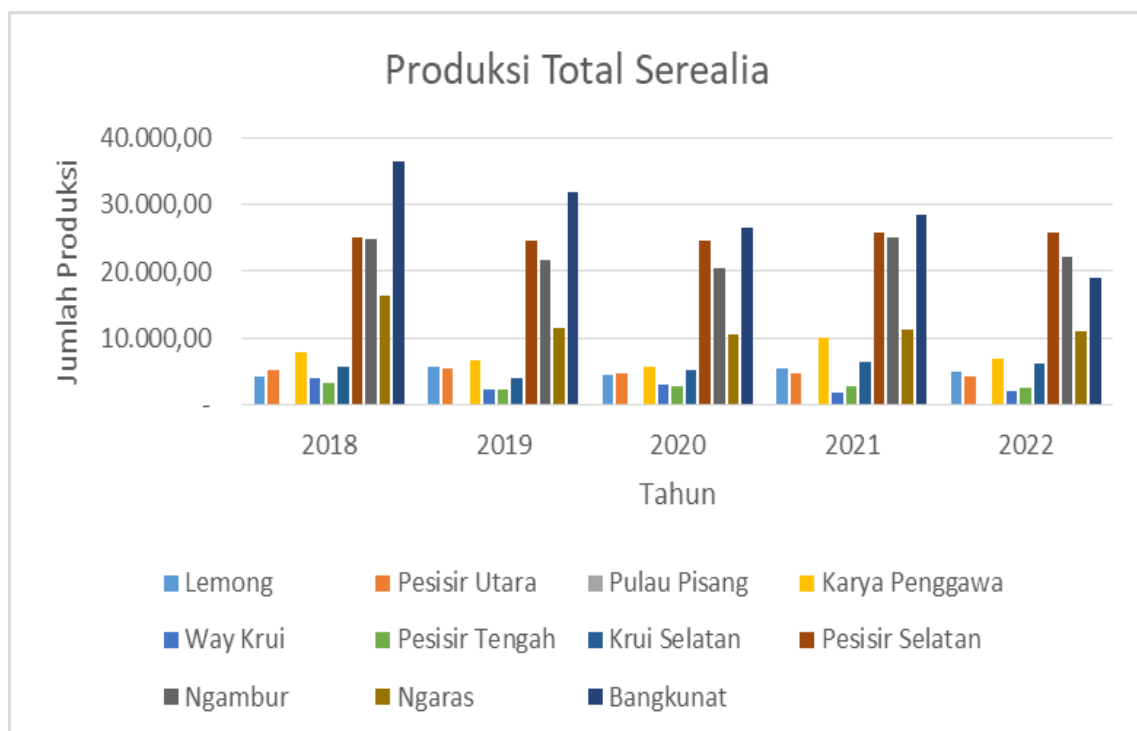
Gambar 3. Grafik Produksi Serealia pokok dan umbi-umbian Tahun 2018-2022

Tahun 2022, total produksi serealia dan umbi-umbian mencapai 85.504,19 ton padi, 15.224,25 ton jagung, 3.536,47 ton ubi kayu, dan ubi jalar 960,20 ton. Total produksi serealia dan laju pertumbuhan produksi menunjukkan pertumbuhan sebesar -13,87. Sebaran total produksi serealia selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 133.332,64 ton dan terkecil pada tahun 2022 yaitu 105.222,11 Ton. Produksi serealia pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Total Serealisa per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi
(2018-2022)

No	Kecamatan	Produksi Total Serealisa					Laju Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Lemong	4.171,66	5.755,00	4.513,00	5.408,27	5.008,88	-7,38
2	Pesisir Utara	5.308,72	5.361,00	4.853,16	4.667,40	4.159,10	-10,89
3	Pulau Pisang	217,69	178,00	197,90	228,49	202,90	-11,20
4	Karya Penggawa	7.838,73	6.689,00	5.807,56	10.040,48	6.991,32	-30,37
5	Way Krui	4.110,66	2.219,00	3.179,08	1.970,46	2.182,68	10,77
6	Pesisir Tengah	3.291,56	2.437,00	2.766,16	2.827,43	2.536,15	-10,30
7	Krui Selatan	5.834,35	4.096,00	5.148,79	6.502,16	6.165,66	-5,18
8	Pesisir Selatan	25.005,15	24.508,00	24.486,53	25.755,52	25.906,82	0,59
9	Ngambur	24.918,08	21.746,00	20.368,66	25.078,77	22.072,32	-11,99
10	Ngaras	16.265,15	11.461,00	10.565,74	11.346,24	10.921,47	-3,74
11	Bangkunat	36.370,90	31.868,00	26.563,06	28.339,96	19.077,82	-32,68
JUMLAH		133.332,64	116.318,00	108.449,64	122.165,18	105.225,11	-13,87

Sumber: Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Gambar 4. Grafik Produksi Total Serealisa per Tahun per Kecamatan

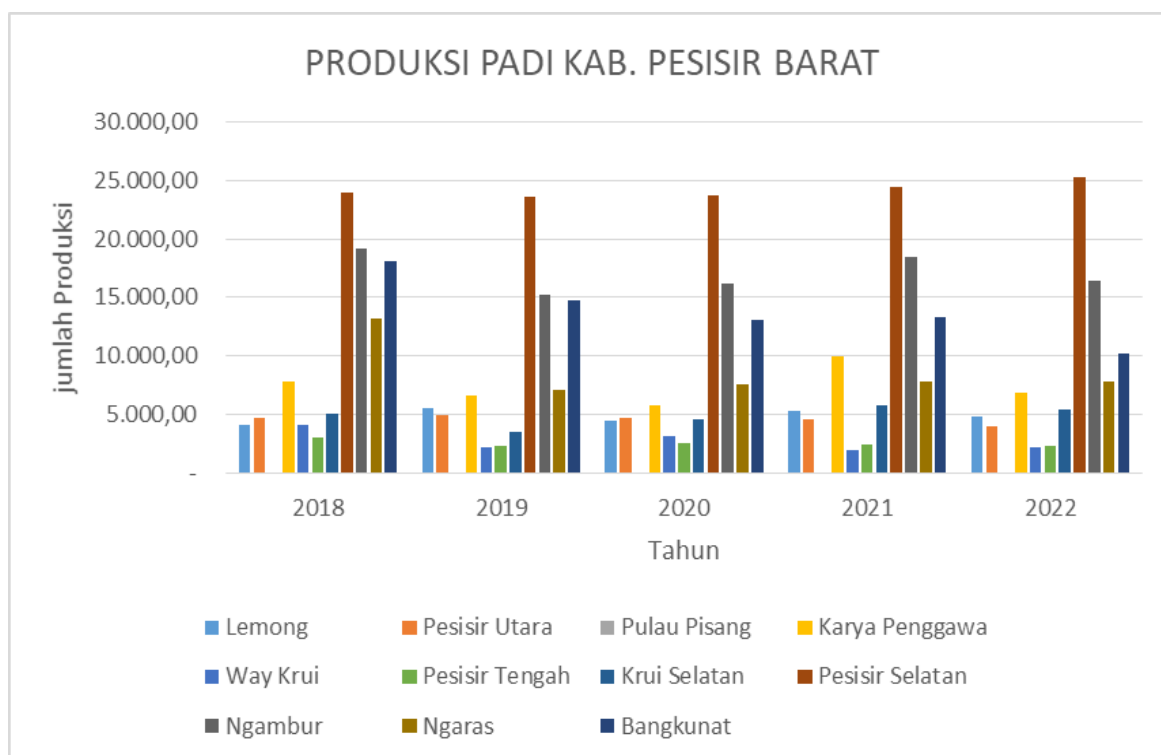
2.2.1 Produksi Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat selama 5 tahun terakhir (2018-2022) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2022 di 3 kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan kecamatan Way Krui, Pesisir Selatan, dan Ngaras. Sedangkan di 7 kecamatan lainnya justru mengalami penurunan. Produksi padi selama 5 tahun terakhir pertumbuhannya fluktuatif, produksi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu terdapat di kecamatan Pesisir Selatan yaitu sebanyak 25.219,85 ton pada tahun 2022. Produksi padi pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2018 - 2022 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Padi					Laju Pertumbuhan 2017-2021
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Lemong	4.112,29	5.524,00	4.433,84	5.328,50	4.902,52	6,69%
2	Pesisir Utara	4.721,21	4.931,00	4.784,40	4.608,92	4.063,56	-3,51%
3	Pulau Pisang	-	-	-	-	-	0,00%
4	Karya Penggawa	7.777,59	6.631,00	5.776,99	9.966,10	6.916,94	3,57%
5	Way Krui	4.110,66	2.219,00	3.179,08	1.970,46	2.182,68	-7,50%
6	Pesisir Tengah	3.108,06	2.373,00	2.593,52	2.444,92	2.350,11	-5,99%
7	Krui Selatan	5.079,45	3.501,00	4.579,06	5.812,26	5.433,00	5,03%
8	Pesisir Selatan	23.993,71	23.598,00	23.760,43	24.422,10	25.219,85	1,27%
9	Ngambur	19.121,66	15.253,00	16.231,01	18.396,16	16.418,96	-2,81%
10	Ngaras	13.202,24	7.065,00	7.605,88	7.821,74	7.847,47	-8,92%
11	Bangkunat	18.093,93	14.712,00	13.086,90	13.281,76	10.169,11	-12,92%
JUMLAH		103.320,79	85.807,00	86.031,11	94.052,92	85.504,19	-4,11%

Sumber: Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Gambar 5. Grafik Produksi Padi per Tahun per Kecamatan

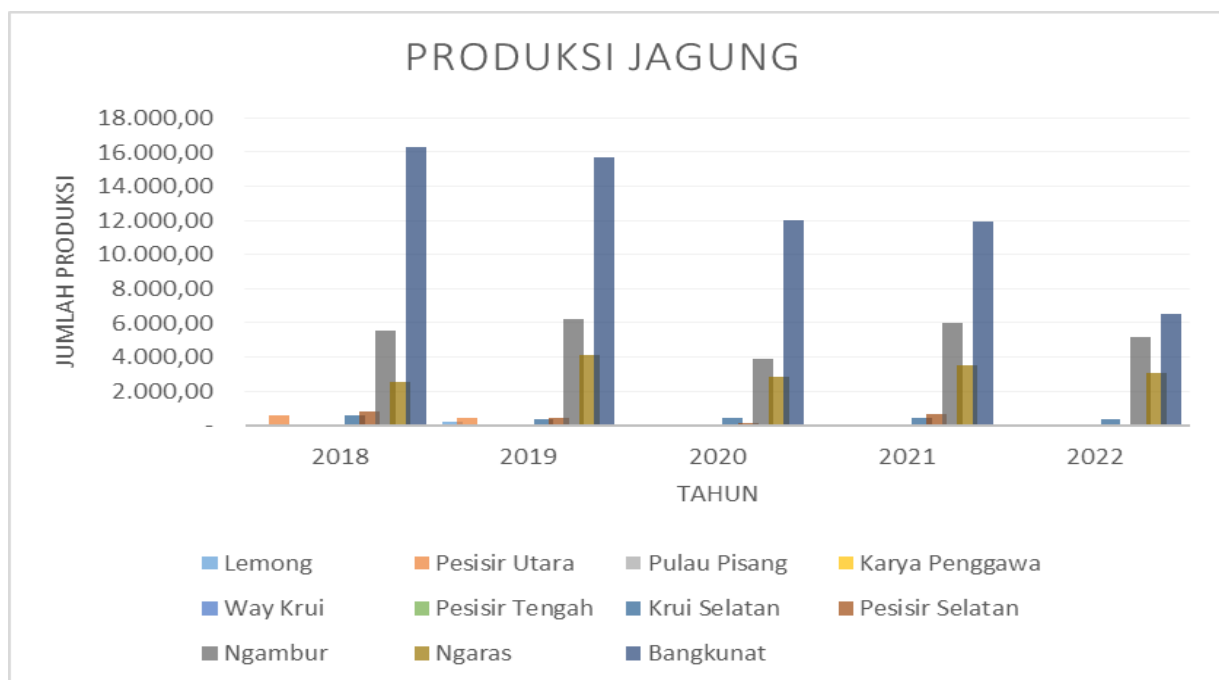
2.2.2 Jagung

Pada tahun 2022, produksi jagung mencapai 15.224,25 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan yang sangat drastis jika dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 22.652,20 Ton atau sebesar 32,79%. Penurunan produksi pada tahun 2022 disebabkan berkurangnya luas tanam komoditi jagung terutama di Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras terutama Bangkunt. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 27.516 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Bangkunt sebesar 15.685 ton, menyusul Kecamatan Ngambur sebesar 6.247 ton. Untuk Kecamatan yang tidak membudiddayakan jagung disebabkan karena banyaknya hama di kecamatan tersebut terutama hama babi dan kera. Secara rinci produksi jagung tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2018 - 2022 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Jagung				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	-	172,00	-	-	-
2	Pesisir Utara	587,51	410,00	-	5,30	-
3	Pulau Pisang	-	-	-	-	-
4	Karya Penggawa	21,56	38,00	10,78	21,20	21,20
5	Way Krui	-	-	-	-	-
6	Pesisir Tengah	5,39	5,00	53,90	5,30	26,50
7	Krui Selatan	587,51	377,00	431,20	424,00	360,40
8	Pesisir Selatan	776,16	442,00	145,53	683,17	31,80
9	Ngambur	5.519,36	6.247,00	3.864,63	6.025,57	5.191,35
10	Ngaras	2.549,47	4.140,00	2.824,36	3.524,50	3.074,00
11	Bangkunat	16.272,41	15.685,00	12.006,76	11.963,16	6.519,00
JUMLAH		26.319,37	27.516,00	19.337,16	22.652,20	15.224,25

Sumber: Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Gambar 6. Grafik Produksi Jagung per Tahun per Kecamatan

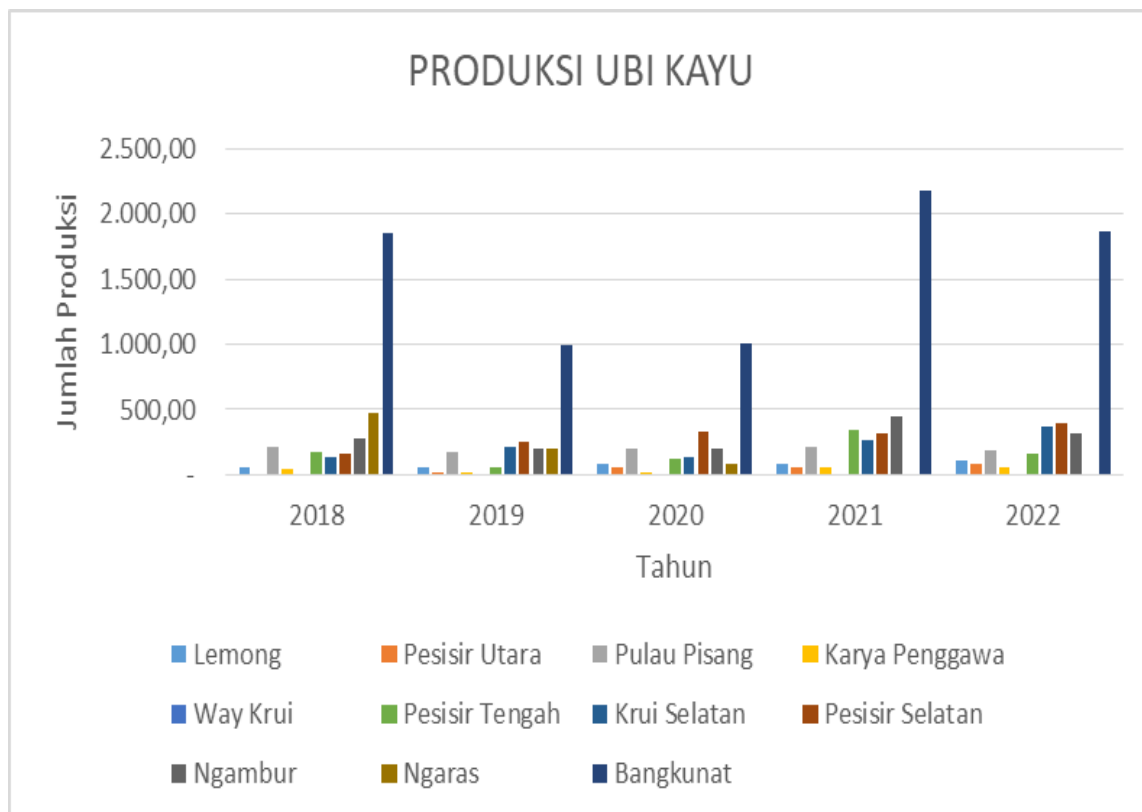
2.2.3 Ubi Kayu

Produksi ubi kayu mengalami penurunan dari 3.536,47 ton pada tahun 2022 menjadi 3.961,91 ton pada tahun 2021. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2022 meliputi kecamatan Bangkumat, Krui Selatan, Pesisir Tengah dan Ngambur. Produksi ubi kayu selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Selama ini ubi kayu bukan merupakan komoditi utama yang dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat namun hanya komoditi sampingan. Rincian produksi ubi kayu tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2018 - 2022 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Ubi Kayu				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	59,37	59,00	79,16	79,77	106,36
2	Pesisir Utara	-	20,00	59,37	53,18	79,77
3	Pulau Pisang	217,69	178,00	197,90	212,72	186,13
4	Karya Penggawa	39,58	20,00	19,79	53,18	53,18
5	Way Krui	-	-	-	-	-
6	Pesisir Tengah	178,11	59,00	118,74	345,67	159,54
7	Krui Selatan	138,53	218,00	138,53	265,90	372,26
8	Pesisir Selatan	158,32	257,00	336,43	319,08	398,85
9	Ngambur	277,06	198,00	197,90	452,03	319,08
10	Ngaras	474,96	198,00	79,16	-	-
11	Bangkumat	1.860,26	990,00	1.009,29	2.180,38	1.861,30
JUMLAH		3.403,88	2.197,00	2.236,27	3.961,91	3.536,47

Sumber: Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022



Gambar 7. Grafik Produksi Ubi Kayu per Tahun per Kecamatan

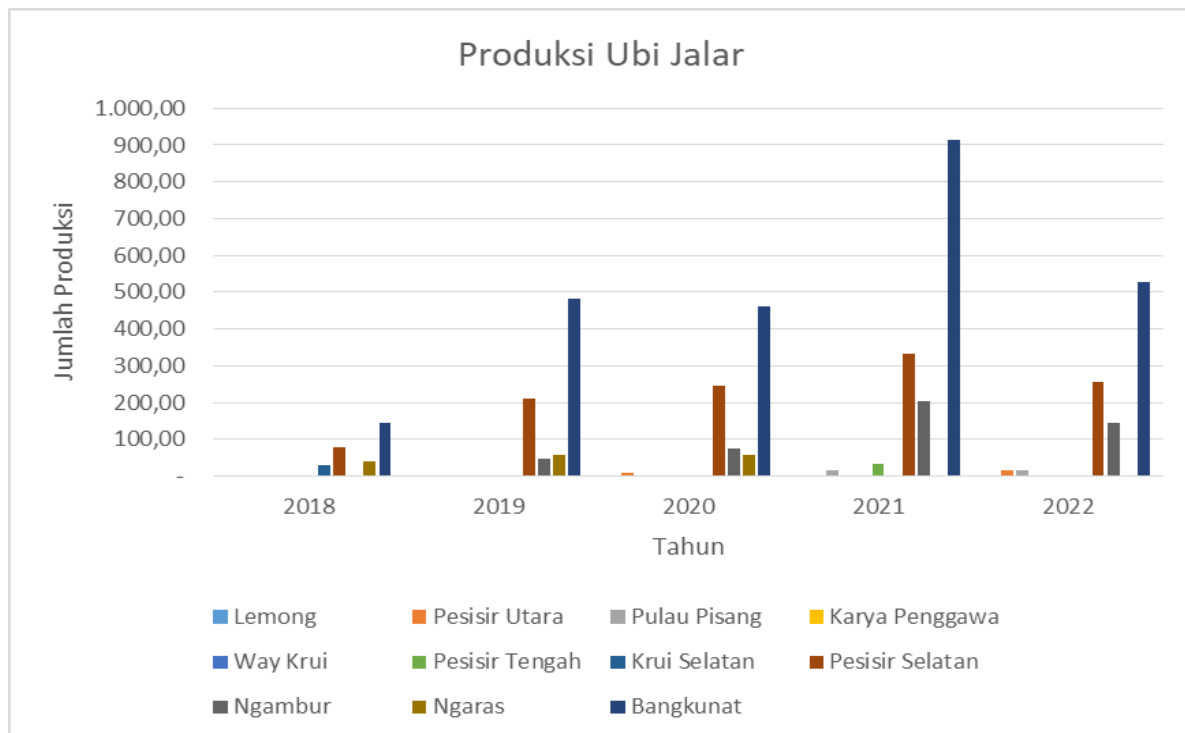
2.2.4 Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2018 - 2022) terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.498,15 ton. Kecamatan Bangkumat merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 914,66 ton atau setara 61,05%, Kecamatan Pesisir Selatan sebesar 331,17 ton dan Kecamatan Ngambur sebesar 205,01 ton. Sama halnya dengan ubi kayu, ubi jalar hanya sebagai komoditi sampingan dibandingkan padi dan jagung. Ubi jalar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2019 dan di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan. Rincian produksi ubi jalar tahun 2018 - 2022 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Produksi Ubi Jalar 2018 - 2022 (Ton)

No	Kecamatan	Produksi Ubi Jalar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lemong	-	-	-	-	-
2	Pesisir Utara	-	-	9,39	-	15,77
3	Pulau Pisang	-	-	-	15,77	16,77
4	Karya Penggawa	-	-	-	-	-
5	Way Krui	-	-	-	-	-
6	Pesisir Tengah	-	-	-	31,54	-
7	Krui Selatan	28,86	-	-	-	-
8	Pesisir Selatan	76,96	211,00	244,14	331,17	256,32
9	Ngambur	-	48,00	75,12	205,01	142,93
10	Ngaras	38,48	58,00	56,34	-	-
11	Bangkunat	144,30	481,00	460,11	914,66	528,41
JUMLAH		288,60	798,00	845,10	1.498,15	960,20

Sumber: Profil Pertanian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2022

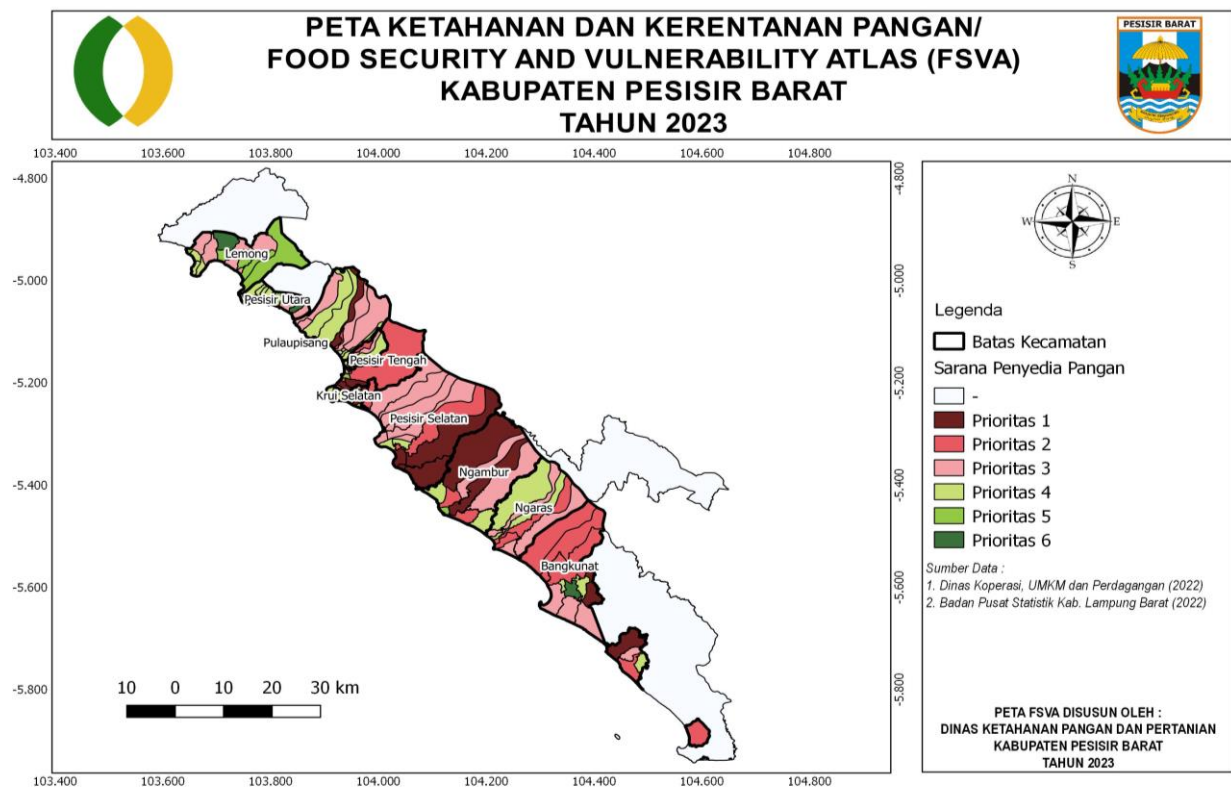


Gambar 8. Grafik Produksi Ubi Jalar per Tahun per Kecamatan

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

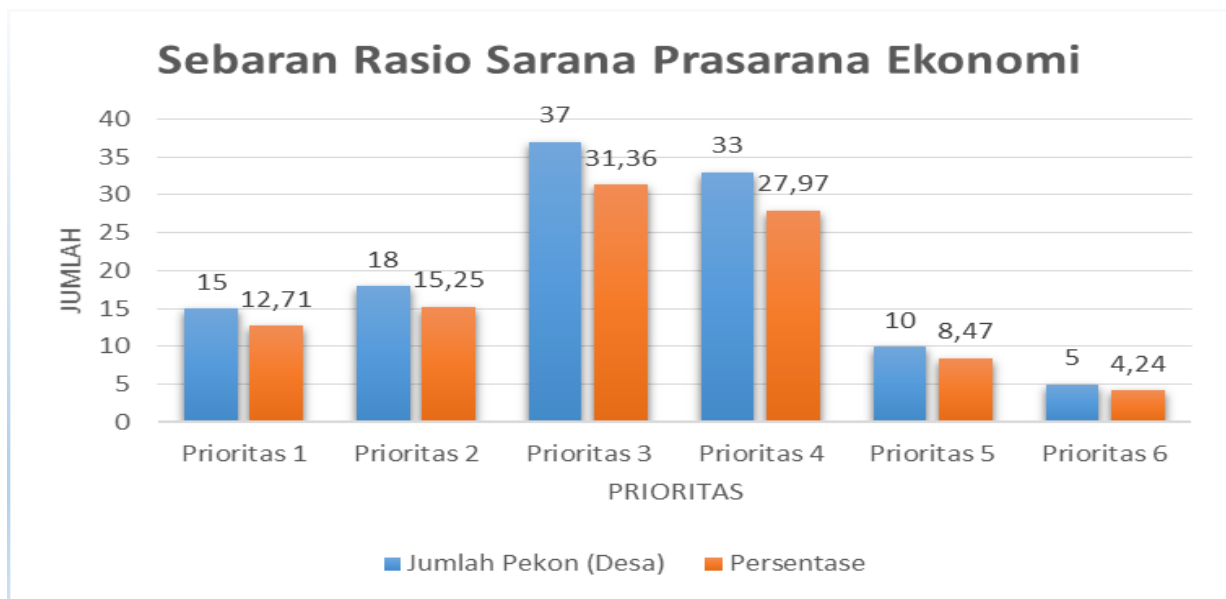
Dari 118 Pekon dan kelurahan di Kabupaten Pesisir Barat, 15 Pekon masuk dalam prioritas 1 (12,71%), 18 Pekon masuk kedalam prioritas 2 (15,25%) dan 37 Pekon masuk kedalam prioritas 3 (31,36%). Dari data ini menunjukkan bahwa prasarana penyediaan pangan di Kabupaten Pesisir Barat masih sangat rendah yaitu sebesar 70 Pekon sedangkan yang cukup memadai penyediaan sumber pangan tersebar di 48 Pekon di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan ketersediaan pangan di tingkat pekon. Adapun rincian peta dapat dilihat pada gambar 9 dan skala prioritas dijabarkan pada tabel 2.8.



Gambar 9. Peta indikator sarana penyedia pangan

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	$\leq 0,0426$	15	12,71%
2	Prioritas 2	0,0426 - 0,0580	18	15,25%
3	Prioritas 3	0,0580 - 0,0823	37	31,36%
4	Prioritas 4	0,0823 - 0,1126	33	27,97%
5	Prioritas 5	0,1126 - 0,1343	10	8,47%
6	Prioritas 6	$> 0,1343$	5	4,24%



Gambar 10. Grafik Sebaran Rasio Prasarana Ekonomi (Penyedia Pangan)

2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat dari tahun mencapai 2,68% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai -1,05% dan -5,41%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten adalah sebesar $\pm 0,25 - 0,3$ ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 6,7%. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 72,03%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

2.4.1 Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pengambilan kebijakan. Indikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung

jawabkan serta pada akhirnya dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam penyelesaian masalah-masalah dalam pembangunan daerah.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2021-2026 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

(i) Peningkatan produktivitas

- a. Pemilihan jenis varietas benih Tanaman pangan yang dapat menghasilkan produktivitas tinggi
- b. Penggunaan pupuk yang tepat dan berimbang, baik pupuk organik maupun non Organik
- c. Pengairan yang dikelola dengan baik
- d. Penggunaan modernisasi pertanian untuk mengurangi kehilangan pasca panen.
- e. Penyuluhan pertanian yang dilakukan secara efektif dan massif oleh PPL Pertanian dilapangan dengan mengenalkan teknologi pertanian yang terbaharukan

(ii) Perluasan lahan pertanian penyedia pangan

- a. Ekstensifikasi padi lading, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
- b. Optimalisasi penggunaan lahan
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- d. Pembangunan sumur pompa dan dam parit/embung

(iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- b. Menyelenggarakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) untuk komoditi Tanaman Pangan
- c. Memanfaatkan informasi BMKG terkait perubahan iklim sehingga dapat diminimalisir dampaknya serta dapat mengambil langkah untuk antisipasi

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani dan Penyedia Pangan

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- b. Membantu hilirisasi Pertanian seperti Penyediaan sarana pengolahan pascapanen, Pemasaran produk pertanian seperti Toko Tani Indonesia (TTI), penumbuhan penyedia pangan baik toko, warung, restoran dan sebagainya.

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

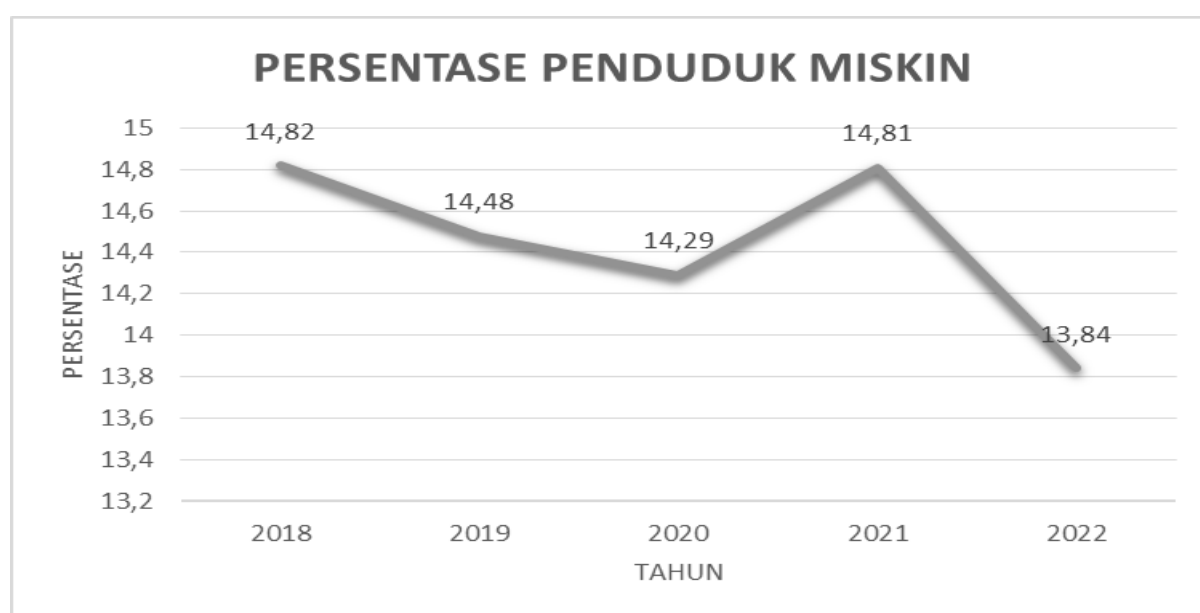
3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami grafik yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir yaitu dari 14,82% tahun 2018 menjadi 13,84 tahun 2022. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin	14,82	14,48	14,29	14,81	13,84

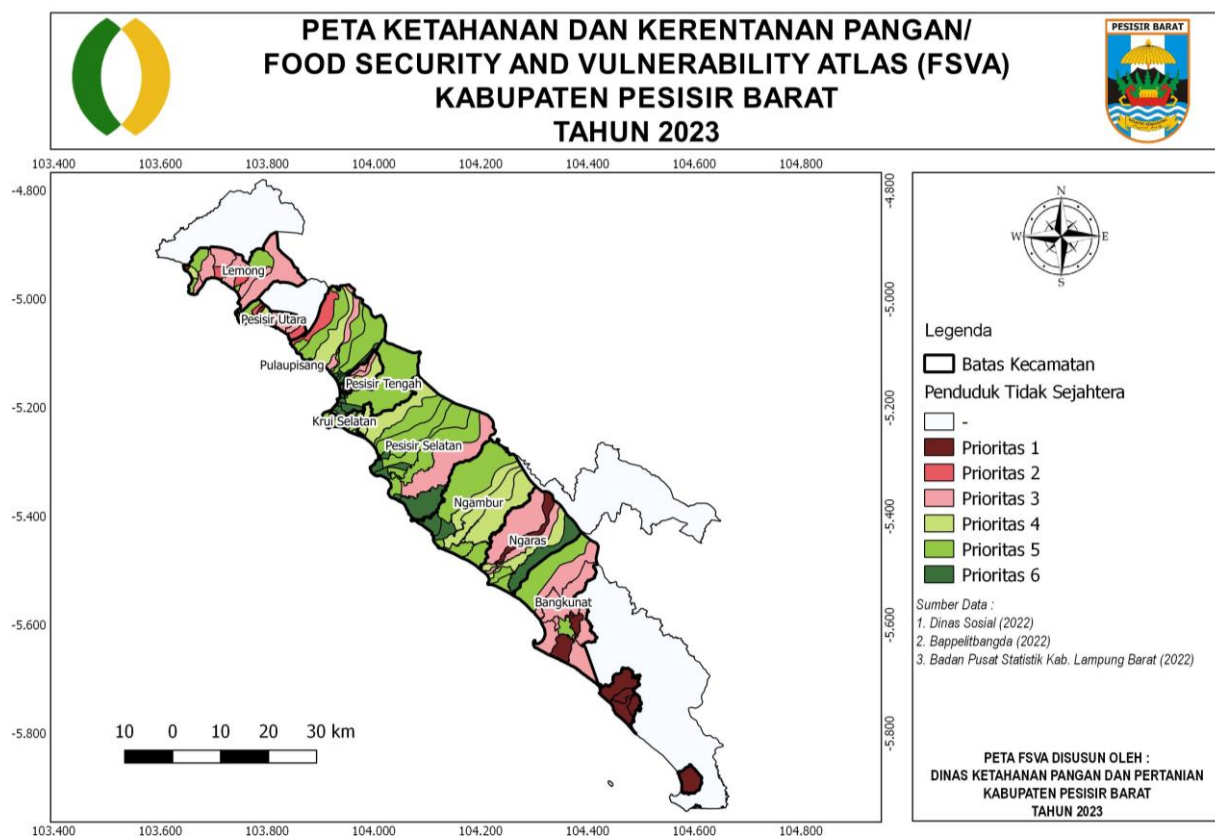
Sumber: Bappelitbangda, 2023



Gambar 11. Grafik Persentase kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan data di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14,92%, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat menurun di tahun 2019 menjadi 14,48. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 14,29%. Tahun 2021 yang masih berada dalam masa pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin bertambah 0,52% menjadi 14,81%. Untuk tahun 2022 persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 13,84%

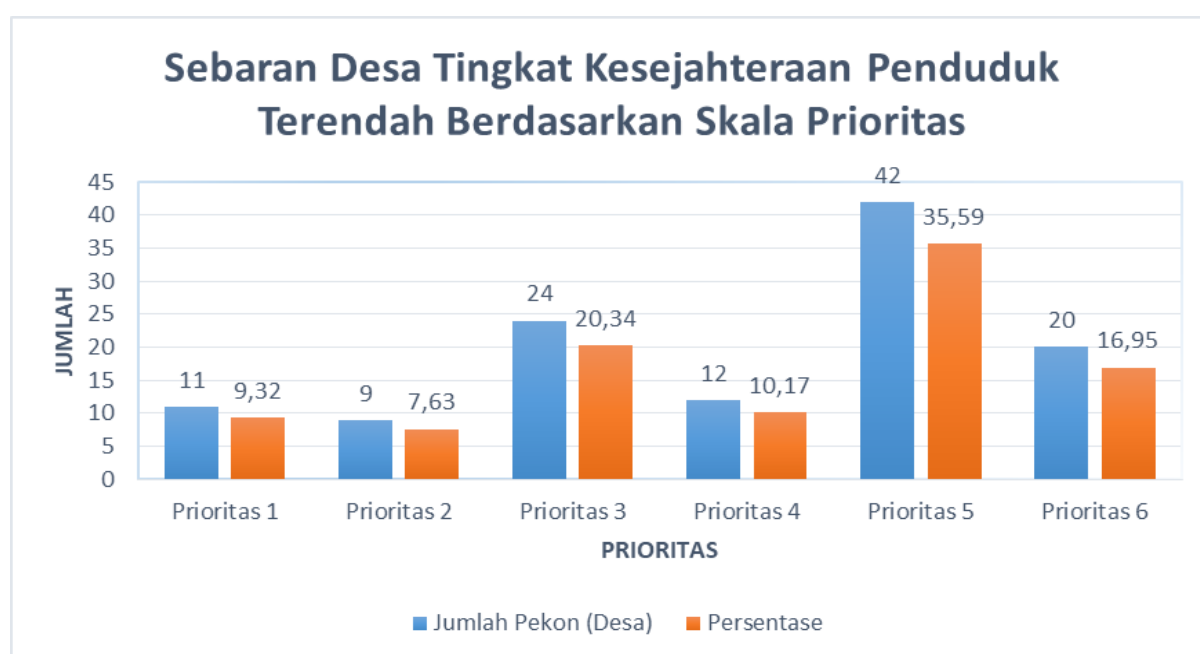
Pada tingkat Pekon berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2022, terdapat 11 Pekon yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah masuk kedalam Prioritas 1 (9,32%). Sebanyak 9 pekon (7,63%) masuk prioritas 2, dan 24 Pekon (20,34%) masuk Prioritas 3. Dimana 3 prioritas tersebut tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat kecuali Kecamatan Pesisir Tengah. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 44 pekon tersebut.



Gambar 12. Peta Indikator sebaran tingkat kesejahteraan penduduk

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Pekon	Persentase
Prioritas 1	$\geq 0,2382$	11	9,32%
Prioritas 2	$0,1868 < 0,2382$	9	7,63%
Prioritas 3	$0,1297 < 0,1868$	24	20,34%
Prioritas 4	$0,1077 < 0,1297$	12	10,17%
Prioritas 5	$0,0811 < 0,1077$	42	35,59%
Prioritas 6	$< 0,0811$	20	16,95%



Gambar 11. Grafik Sebaran Desa Tingkat Kesejahteraan Penduduk

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi

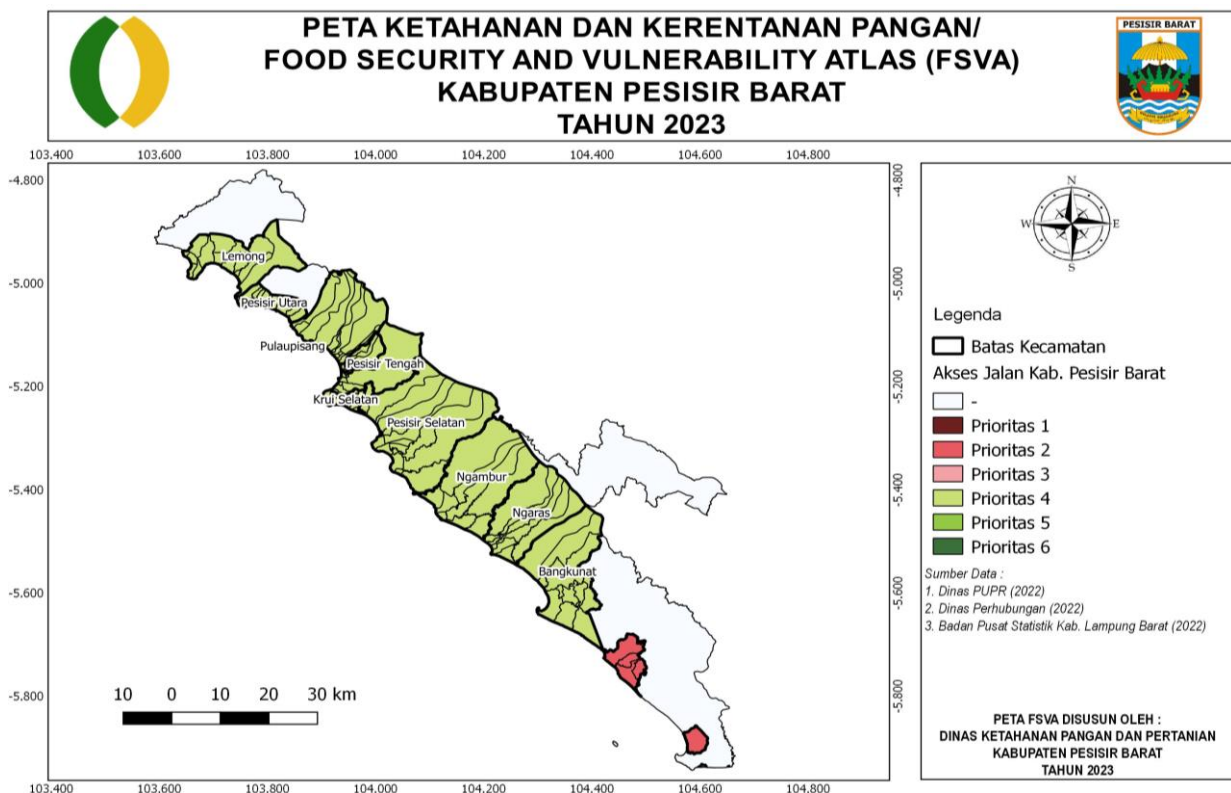
pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai.

Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani. Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Potensi Desa BPS Lampung Barat (2022), di Kabupaten Pesisir Barat, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan/lainnya) terdapat di sepuluh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat kecuali Kecamatan Pulau Pisang. Sedangkan Pulau Pisang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Sementara desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di Kecamatan Bangkunt (Pekon Way Haru, Siring Gading, Way Tias, dan Bandar Dalam).

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Pesisir Barat akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya yaitu di Kecamatan Pulau Pisang. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air melalui jalur laut.



Gambar 14. Peta Indikator Jalan Penghubung

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya :

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agribisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB 4

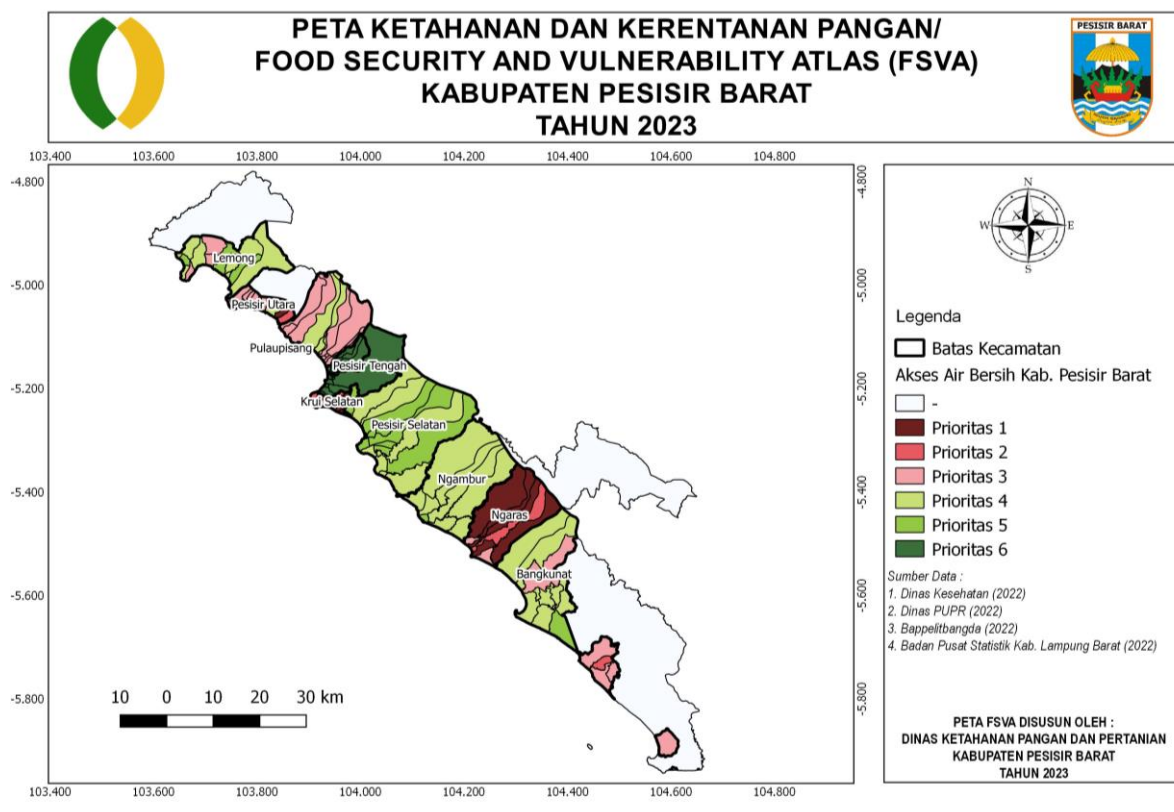
PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

¹ Permenkes 416 Tahun 1990

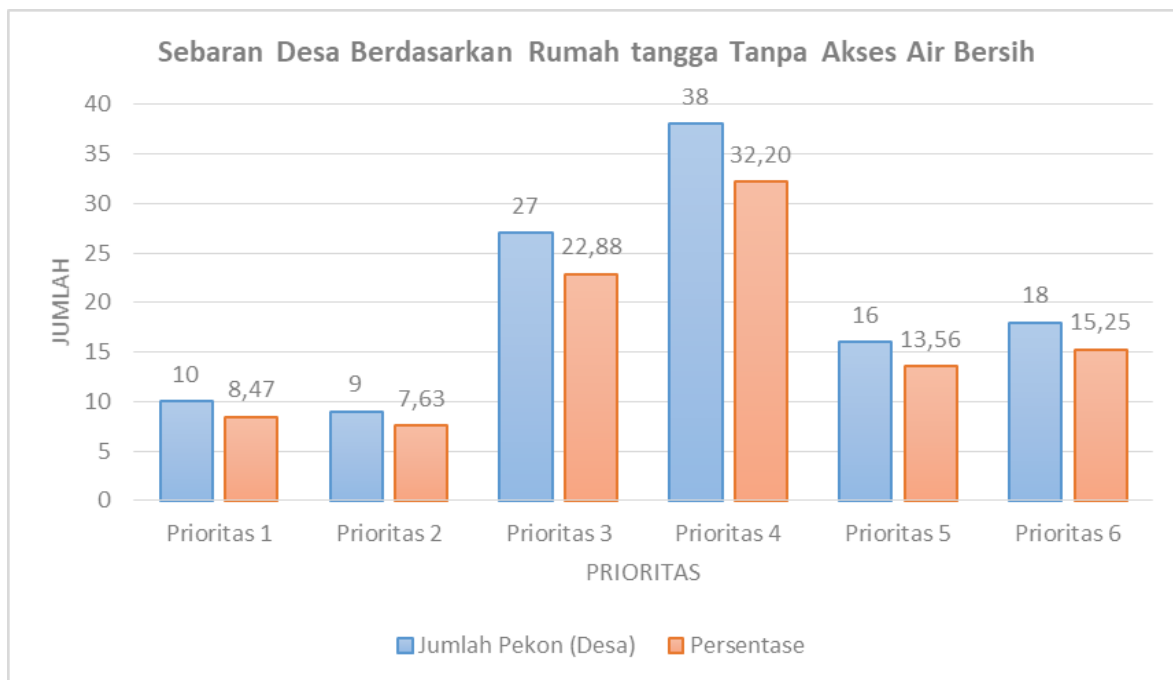


Gambar 15. Peta Indikator rasio rumah tangga tanpa air bersih terhadap jumlah rumah tangga

Kondisi sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas dari hasil peta diatas secara rinci terdapat pada table 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
Prioritas 1	$\geq 0,4948$	10	8,47%
Prioritas 2	$0,3774 < 0,4948$	9	7,63%
Prioritas 3	$0,2395 < 0,3774$	27	22,88%
Prioritas 4	$0,0928 < 0,2395$	38	32,20%
Prioritas 5	$0,0370 < 0,0928$	16	13,56%
Prioritas 6	$< 0,0370$	18	15,25%

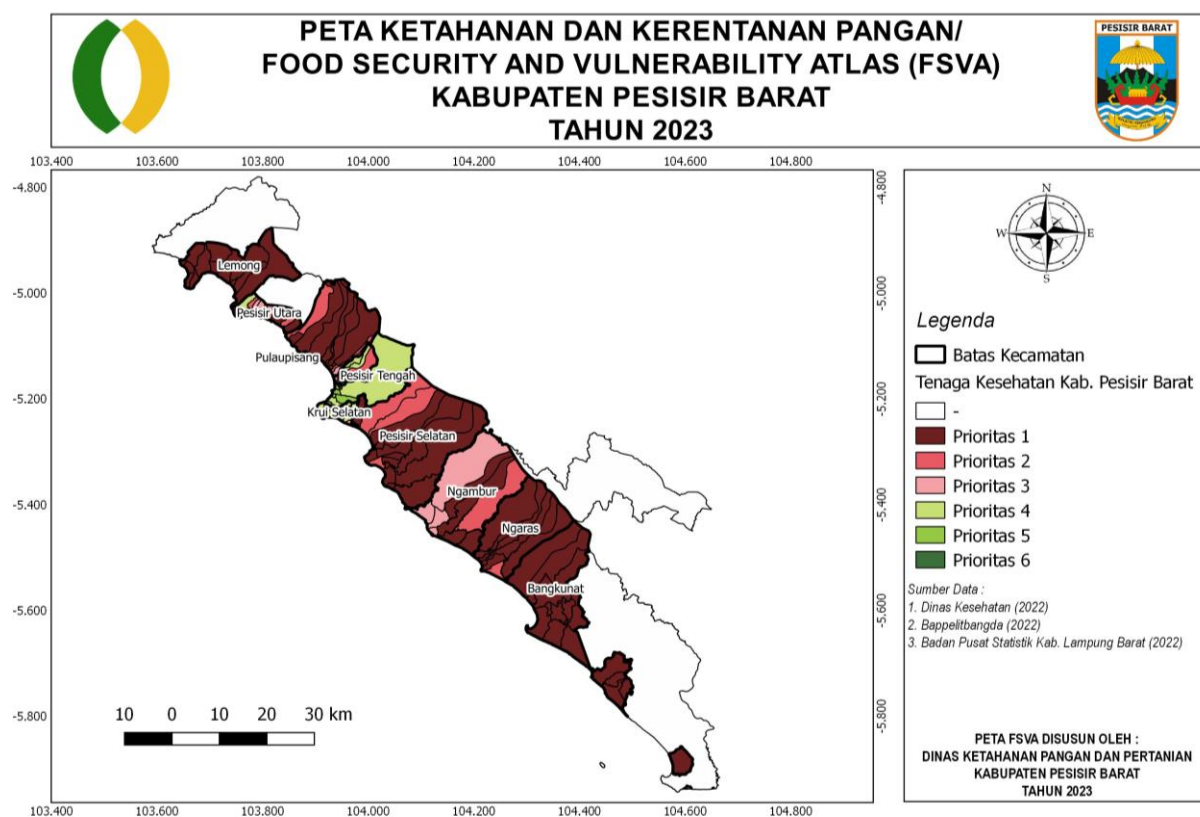


Gambar 16. Sebaran Desa dengan rumah tangga tanpa air bersih berdasarkan skala prioritas

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

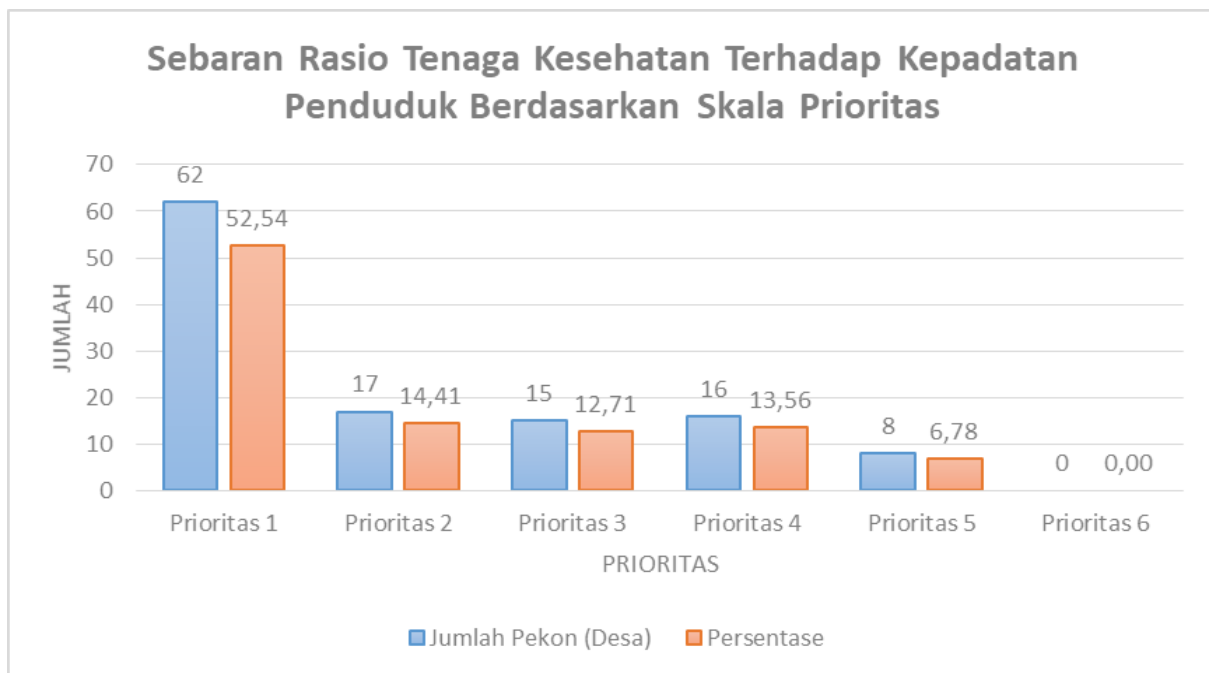


Gambar 17. Peta Indikator rasio tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk

Kondisi skala prioritas rasio tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk disuatu desa berdasarkan gambar diatas secara rinci terdapat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
Prioritas 1	$\geq 8,9898$	62	52,54%
Prioritas 2	$4,7825 < 8,9898$	17	14,41%
Prioritas 3	$2,1724 < 4,7825$	15	12,71%
Prioritas 4	$1,1724 < 2,1743$	16	13,56%
Prioritas 5	$0,3133 < 1,1724$	8	6,78%
Prioritas 6	$< 0,3133$	0	0,00%



Gambar 18. Sebaran rasio tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk

4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017-2021 sebanyak 4 balita. Jumlah penderita gizi buruk setiap tahunnya ditemukan di kecamatan yang berbeda-beda. Pada Tahun 2018 kasus gizi buruk ditemukan di Kecamatan Bangkumat, 2019 dan 2021 di Kecamatan Ngambur serta 2020 di Kecamatan Karya Penggawa.

Tabel 4.2 Penderita Gizi Buruk 2017-2021

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	LEMONG	0	0	0	0	0
2	PESISIR UTARA	0	0	0	0	0
3	PULAU PISANG	0	0	0	0	0
4	KARYA PENGGAWA	0	0	0	1	0
5	WAY KRUI	0	0	0	0	0
6	PESISIR TENGAH	0	0	0	0	0
7	KRUI SELATAN	0	0	0	0	0
8	PESISIR SELATAN	0	0	0	0	0
9	NGAMBUR	0	0	1	0	1
10	NGARAS	0	0	0	0	0
11	BANGKUNAT	0	1	0	0	0
	TOTAL	0	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat



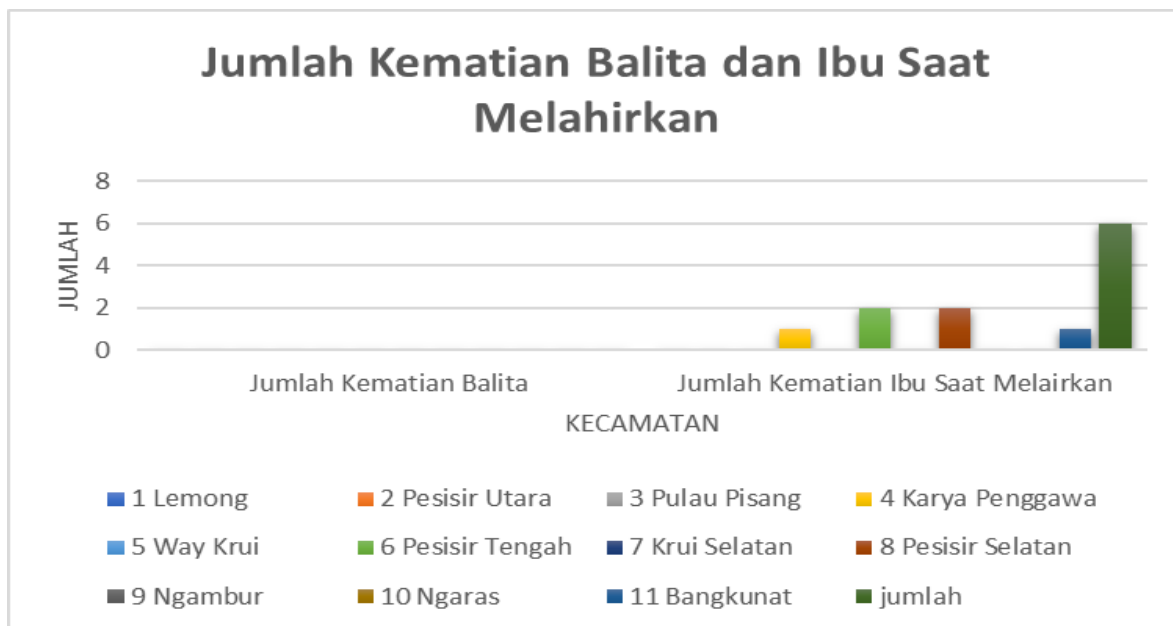
Gambar 19. Grafik Penderita Gizi Buruk

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Pesisir Barat adalah 0 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Pesisir Barat 6 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan masing-masing 2 jiwa dan terendah di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Way Krui, Krui Selatan, Ngambur dan Ngaras (0 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Lemong	0	0	0
2	Pesisir Utara	0	0	0
3	Pulau Pisang	0	0	0
4	Karya Penggawa	0	1	1
5	Way Krui	0	0	0
6	Pesisir Tengah	0	2	2
7	Krui Selatan	0	0	0
8	Pesisir Selatan	0	2	2
9	Ngambur	0	0	0
10	Ngaras	0	0	0
11	Bangkunat	0	1	1
	Total	0	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 20. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Pesisir Barat, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah

mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan,

kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
- Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajanan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang

tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

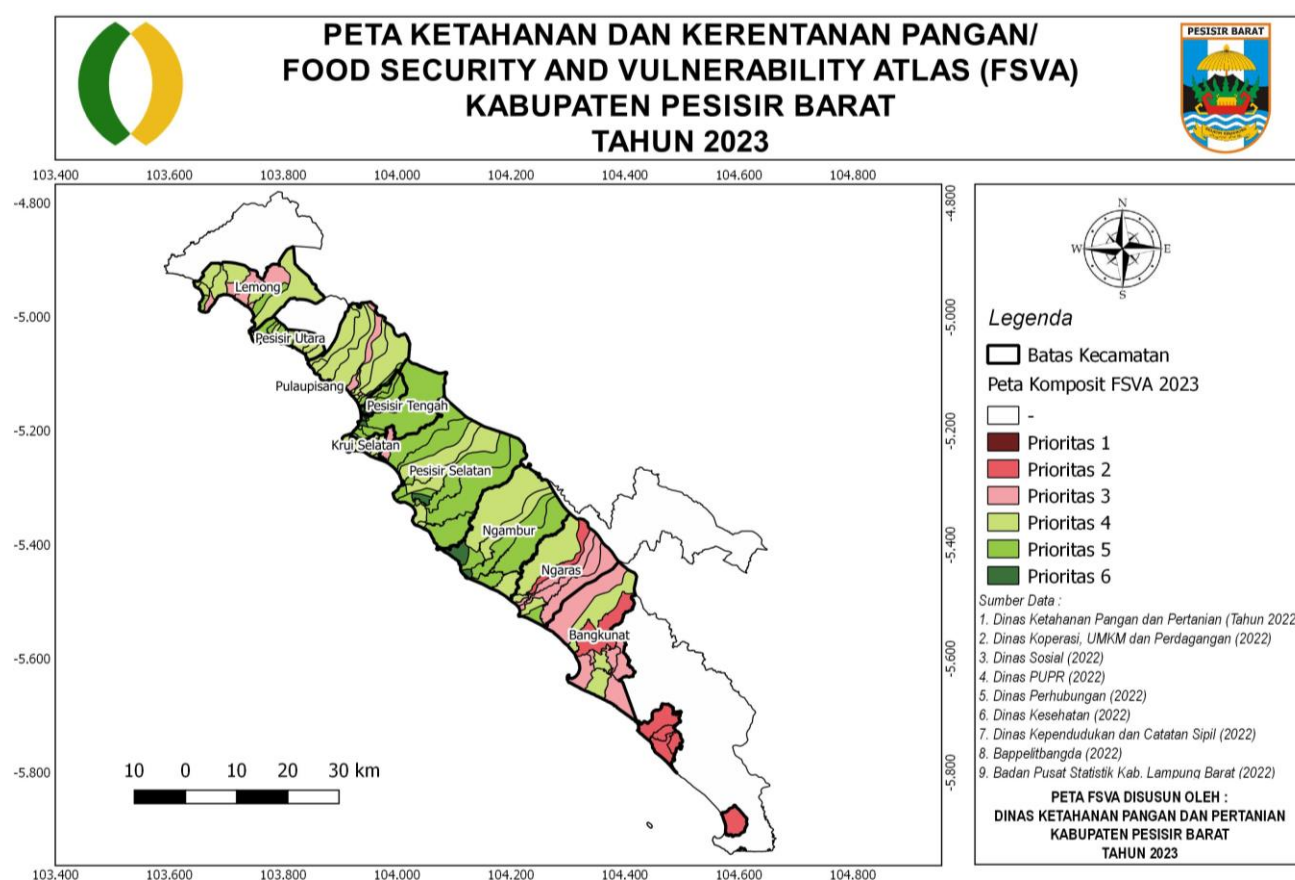
Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab II, Bab III dan Bab IV. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (gambar 21) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, Pekon-Pekon dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (pekon) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (pekon) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (pekon) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (pekon) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis dari 6 indikator tersebut yang di kompilasi menjadi indikator komposit, dari 118 pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat maka

didapatkan 0 pekon (Prioritas 1), 6 pekon (Prioritas 2), 16 pekon (Prioritas 3), 49 pekon (Prioritas 4), 39 pekon (Prioritas 5) dan 8 pekon (Prioritas 6).



Gambar 20. Peta Kondisi Ketahanan Pangan di Kab. Pesisir Barat secara komposit

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Pekon berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Pekon	Persentase	Keterangan
Prioritas 1	0	0,00%	Sangat Rentan Rawan Pangan
Prioritas 2	6	5,08%	Rentan Rawan Pangan
Prioritas 3	16	13,56%	Agak Rentan Rawan Pangan
Prioritas 4	49	41,53%	Agak Tahan dari Rawan Pangan
Prioritas 5	39	33,05%	Tahan dari Rawan Pangan
Prioritas 6	8	6,78%	Sangat Tahan dari Rawan Pangan
TOTAL	118	100,00%	

a. Prioritas 2

Pekon rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Bangkumat sebanyak 5 pekon dan Kecamatan Ngaras 1 Pekon Rincian Pekon dijabarkan di tabel 5.2.

Tabel 5.2 Rincian Pekon yang masuk kedalam Prioritas 2

No.	KECAMATAN	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	PRIO KOMP
1	Ngaras	1813102	1813102001	Negeri Ratu Ngaras	2
2	Bangkumat	1813112	1813112003	Suka Marga	2
3	Bangkumat	1813112	1813112006	Bandar Dalam	2
4	Bangkumat	1813112	1813112007	Way Haru	2
5	Bangkumat	1813112	1813112011	Siring Gading	2
6	Bangkumat	1813112	1813112012	Way Tias	2



Gambar 22. Sebaran Jumlah Pekon Priroitas 2 per Kecamatan

b. Prioritas 3

Pekon rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di 5 Kecamatan yaitu antara lain Kecamatan Lemong, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkumat. Adapun rinciannya dijabarkan pada table 5.3.

Tabel 5.3 Rincian Pekon yang masuk kedalam Prioritas 3

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	PRIO KOMP
1	Pesisir Selatan	1813022	1813022015	Tulung Bamban	3
2	Lemong	1813032	1813032005	Cahaya Negeri	3
3	Lemong	1813032	1813032006	Malaya	3
4	Lemong	1813032	1813032008	Pagar Dalam	3
5	Lemong	1813032	1813032013	Parda Haga	3
6	Karya Penggawa	1813052	1813052003	Way Sindi	3
7	Karya Penggawa	1813052	1813052007	Penggawa V Ulu	3
8	Ngaras	1813102	1813102004	Mulang Maya	3
9	Ngaras	1813102	1813102005	Rajabasa	3
10	Ngaras	1813102	1813102018	Suka Maju	3
11	Bangkumat	1813112	1813112001	Pagar Bukit	3
12	Bangkumat	1813112	1813112002	Tanjung Kemala	3
13	Bangkumat	1813112	1813112004	Kota Jawa	3
14	Bangkumat	1813112	1813112008	Pemerihan	3
15	Bangkumat	1813112	1813112010	Sumberejo	3
16	Bangkumat	1813112	1813112014	Pagar Bukit Induk	3



Gambar 23. Sebaran Jumlah Pekon Priroitas 3 Per Kecamatan

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Pekon rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh (1) kurangnya sarana penyedia pangan terhadap jumlah penduduk di kedua pekan tersebut, (2) Permasalahan dalam tingkat kesejahteraan penduduk, (3) Akses Jalan Penghubung, (4) Akses Jalan di beberapa pekan seperti di Way Haru, Siring Gading, Bandar Dalam dan Way Tias, (5) Akses masyarakat di desa tersebut terhadap kebutuhan air bersih, serta (6) jumlah tenaga medis/kesahatan di kedua pekan tersebut yang belum memadai terhadap jumlah kepadatan penduduk.

Pekon rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh (1) Kondisi luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, (2) kurangnya sarana penyedia pangan terhadap jumlah penduduk, (3) Permasalahan dalam

tingkat kesejahteraan penduduk, (4) Akses masyarakat di desa tersebut terhadap kebutuhan air bersih, serta (5) jumlah tenaga medis/kesahatan di pekon tersebut yang belum memadai terhadap jumlah kepadatan penduduk.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (Pekon), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah pekon diprioritaskan pada:

- a. Pekon-pekon yang masuk kedalam prioritas 2-3 secara komposit yang jumlahnya ada sekitar 22 Pekon dan tersebar di Kecamatan Lemong, Karya Penggawa, Pesisir Selatan, Ngaras dan Bangkumat ini yang menjadi fokus utama dalam penanganan kerawanan pangan.
- b. Pekon-pekon yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Pekon-pekon yang masih terkendala terhadap akses melalui jalur darat yang bisa dilalui roda 4 sepanjang tahun ataupun Kecamatan yang hanya bias dilalui jalur air seperti Pulau Pisang.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di pekon seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.



Gambar 24. Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- Melakukan Ekstensifikasi Pertanian melalui Pembukaan lahan pertanian baru baik cetak sawah ataupun penggunaan lahan kering serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pertanian bagi petani serta meningkatkan kelembagaan petani.
- Melakukan Intensifikasi Pertanian untuk meningkatkan Produktivitas Pertanian dengan memanfaatkan benih unggul, penggunaan pupuk tepat guna, penggunaan air yang cukup serta melakukan modernisasi pertanian..
- Penggunaan dana Desa di arahkan untuk mendukung Ketahanan Pangan untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan.

- d. Untuk daerah yang berada di wilayah sulit akses transportasi dapat diberikan subsidi ojek untuk menekan harga pangan di daerah yang sulit dijangkau sehingga harga pangan tidak jauh dari harga pangan di pekan lainnya.
- e. Terkait jalur transportasi darat yang tidak dapat dilalui sepanjang tahun dapat diarahkan menggunakan transportasi lainnya seperti transportasi laut dengan memberikan subsidi terhadap angkutan laut sehingga distribusi pangan tidak terkendala.
- f. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- g. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- h. Peningkatan akses dan mutu pelayanan tenaga Kesehatan pada seluruh tingkat baik secara individu, keluarga maupun masyarakat.

Ketahanan pangan daerah sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program pemberdayaan masyarakat, menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga/keluarga.

Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan

kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasi pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan. Pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan melalui pilar ketahanan pangan, yang terdiri dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, terjangkau pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan, serta penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizinya.

LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Perhitungan Indeks Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Indeks Ketersediaan	Indeks Akses	Indeks Pemanfaatan
1	Pesisir Tengah	Pasar Krui	26,06	98,50	99,17
2	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui	14,66	97,95	99,49
3	Pesisir Tengah	Way Redak	13,82	90,66	98,73
4	Pesisir Tengah	Serai	10,35	94,29	97,29
5	Pesisir Tengah	Kampung Jawa	11,27	95,50	99,00
6	Pesisir Tengah	Rawas	7,36	97,55	99,11
7	Pesisir Tengah	Suka Negara	18,24	89,22	94,01
8	Pesisir Tengah	Pahmungan	11,79	89,15	98,17
9	Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	27,84	86,76	86,34
10	Pesisir Selatan	Sukarame	23,76	89,80	86,16
11	Pesisir Selatan	Pelita Jaya	28,26	90,36	54,33
12	Pesisir Selatan	Sumur Jaya	31,30	90,45	55,67
13	Pesisir Selatan	Tanjung Jati	35,36	86,76	93,01
14	Pesisir Selatan	Pagar Dalam	29,33	95,47	81,66
15	Pesisir Selatan	Tanjung Setia	20,47	96,27	79,53
16	Pesisir Selatan	Biha	28,06	96,27	76,25
17	Pesisir Selatan	Way Jambu	28,14	90,22	61,12
18	Pesisir Selatan	Marang	20,36	94,77	80,78
19	Pesisir Selatan	Tanjung Raya	34,22	86,04	75,91
20	Pesisir Selatan	Bangun Negara	15,82	96,78	74,71
21	Pesisir Selatan	Ulok Manik	40,73	90,44	83,67
22	Pesisir Selatan	Paku Negara	37,08	92,23	66,13
23	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	18,26	88,30	48,51
24	Lemong	Tanjung Jati	42,95	77,65	54,05
25	Lemong	Tanjung Sakti	37,23	87,79	61,32
26	Lemong	Way Batang	27,79	90,08	74,46
27	Lemong	Lemong	18,29	84,67	73,64
28	Lemong	Cahaya Negeri	33,73	82,27	28,63
29	Lemong	Malaya	22,80	82,80	43,99

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Indeks Ketersediaan	Indeks Akses	Indeks Pemanfaatan
30	Lemong	Bambang	34,16	81,58	48,62
31	Lemong	Pagar Dalam	20,13	89,18	50,49
32	Lemong	Bandar Pugung	30,90	85,68	80,14
33	Lemong	Penengahan	32,32	85,26	54,63
34	Lemong	Rata Agung	15,80	89,94	56,15
35	Lemong	Sukamulya	38,27	83,98	48,66
36	Lemong	Parda Haga	25,32	84,85	35,54
37	Pesisir Utara	Kuripan	36,13	91,20	77,65
38	Pesisir Utara	Padang Rindu	27,24	90,02	77,93
39	Pesisir Utara	Negeri Ratu	28,42	90,73	76,25
40	Pesisir Utara	Kerbang Dalam	32,80	80,23	69,65
41	Pesisir Utara	Kota Karang	41,28	84,25	78,18
42	Pesisir Utara	Balam	35,04	86,72	79,41
43	Pesisir Utara	Way Narta	42,81	79,73	64,29
44	Pesisir Utara	Kerbang Langgar	46,54	82,39	73,02
45	Pesisir Utara	Walur	27,78	89,10	61,85
46	Pesisir Utara	Batu Raja	30,32	82,92	73,94
47	Pesisir Utara	Pemancar	28,36	81,47	62,50
48	Pesisir Utara	Gedau	49,09	84,82	57,14
49	Karya Penggawa	Kebuayan	18,85	91,05	68,23
50	Karya Penggawa	Way Nukak	20,69	89,53	67,21
51	Karya Penggawa	Way Sindi	12,45	85,92	58,91
52	Karya Penggawa	Penengahan	18,52	91,83	70,11
53	Karya Penggawa	Menyancang	29,83	93,79	78,90
54	Karya Penggawa	Laay	23,05	99,54	65,55
55	Karya Penggawa	Penggawa V Ulu	17,60	95,94	26,67
56	Karya Penggawa	Penggawa V Tengah	30,05	95,34	69,83
57	Karya Penggawa	Way Sindi Utara	20,24	92,21	51,74
58	Karya Penggawa	Tembakak Way Sindi	29,55	89,93	51,62
59	Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan	26,40	86,78	59,24

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Indeks Ketersediaan	Indeks Akses	Indeks Pemanfaatan
60	Karya Penggawa	Asahan Way Sindi	19,27	80,93	76,26
61	Pulaupisang	Pasar Pulaupisang	17,14	79,09	92,00
62	Pulaupisang	Labuhan	20,14	80,95	87,18
63	Pulaupisang	Bandar Dalam	0,53	89,37	86,12
64	Pulaupisang	Pekon Lok	5,32	90,50	93,90
65	Pulaupisang	Sukadana	10,92	80,64	85,49
66	Pulaupisang	Suka Marga	1,60	91,58	77,02
67	Way Krui	Pajar Bulan	19,33	89,85	97,54
68	Way Krui	Bumi Waras	25,99	91,95	97,79
69	Way Krui	Banjar Agung	25,37	82,54	99,28
70	Way Krui	Penggawa V Ilir	24,90	93,89	93,88
71	Way Krui	Ulu Krui	20,39	84,28	97,35
72	Way Krui	Gunung Kemala	13,82	84,95	97,60
73	Way Krui	Labuhan Mandi	19,32	86,10	98,53
74	Way Krui	Suka Baru	19,28	81,93	90,38
75	Way Krui	Penggawa Lima	25,37	81,17	96,74
76	Way Krui	Gunungkemala Timur	22,28	86,43	93,23
77	Krui Selatan	Balai Kencana	15,16	89,54	61,91
78	Krui Selatan	Way Suluh	24,22	88,55	71,70
79	Krui Selatan	Way Napal	19,27	84,85	61,94
80	Krui Selatan	Padang Haluan	15,03	99,92	69,15
81	Krui Selatan	Lintik	23,78	91,82	75,06
82	Krui Selatan	Walur	24,11	91,84	71,89
83	Krui Selatan	Pemerihan	43,51	94,01	58,34
84	Krui Selatan	Mandiri Sejati	52,05	88,55	53,84
85	Krui Selatan	Padang Raya	33,48	89,17	67,56
86	Krui Selatan	Suka Jadi	19,84	88,93	73,72
87	Ngambur	Sumber Agung	36,54	97,81	85,53
88	Ngambur	Ulok Mukti	14,30	90,04	84,91
89	Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	19,47	93,51	84,91

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Indeks Ketersediaan	Indeks Akses	Indeks Pemanfaatan
90	Ngambur	Pekon Mon	31,98	86,37	75,01
91	Ngambur	GC. Kuningan	28,26	91,65	62,79
92	Ngambur	Suka Banjar	26,67	87,15	78,76
93	Ngambur	Suka Negara	27,11	90,70	76,48
94	Ngambur	Muara Tembulih	34,80	92,00	90,15
95	Ngambur	Bumi Ratu	26,15	87,36	76,35
96	Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	30,54	55,37	26,51
97	Ngaras	Kota Batu	45,91	84,17	37,76
98	Ngaras	Mulang Maya	44,22	86,09	8,69
99	Ngaras	Rajabasa	30,60	86,64	41,49
100	Ngaras	Pardasuka	27,77	90,33	65,53
101	Ngaras	Padang Alam	30,96	87,28	63,40
102	Ngaras	Suka Maju	25,29	92,81	24,38
103	Ngaras	Sukarame	29,43	91,43	71,34
104	Ngaras	Bandar Jaya	44,68	88,79	46,65
105	Bangkunat	Pagar Bukit	14,86	88,58	34,40
106	Bangkunat	Tanjung Kemala	32,88	71,96	36,85
107	Bangkunat	Suka Marga	16,43	83,74	35,52
108	Bangkunat	Kota Jawa	25,99	83,91	45,78
109	Bangkunat	Penyandingan	36,45	88,95	55,24
110	Bangkunat	Bandar Dalam	12,40	79,14	29,93
111	Bangkunat	Way Haru	25,20	80,33	28,34
112	Bangkunat	Pemerihan	10,24	85,45	48,65
113	Bangkunat	Suka Negeri	41,06	80,09	67,52
114	Bangkunat	Sumberejo	24,16	84,25	45,15
115	Bangkunat	Siring Gading	27,72	78,67	25,89
116	Bangkunat	Way Tias	27,94	80,17	20,91
117	Bangkunat	Tanjung Rejo	14,91	85,05	65,76
118	Bangkunat	Pagar Bukit Induk	31,75	84,25	42,34

2. Lampiran Indeks Ketahanan Pangan Per Pekon

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM
1	Pesisir Tengah	1813011	1813011005	Pasar Krui	74,58
2	Ngambur	1813092	1813092001	Sumber Agung	73,30
3	Ngambur	1813092	1813092008	Muara Tembulih	72,32
4	Way Krui	1813072	1813072002	Bumi Waras	71,91
5	Pesisir Selatan	1813022	1813022005	Tanjung Jati	71,71
6	Pesisir Selatan	1813022	1813022013	Ulok Manik	71,61
7	Way Krui	1813072	1813072004	Penggawa V Ilir	70,89
8	Pesisir Tengah	1813011	1813011008	Pasar Kota Krui	70,70
9	Way Krui	1813072	1813072003	Banjar Agung	69,06
10	Way Krui	1813072	1813072001	Pajar Bulan	68,91
11	Pesisir Selatan	1813022	1813022006	Pagar Dalam	68,82
12	Pesisir Tengah	1813012	1813012003	Kampung Jawa	68,59
13	Pesisir Utara	1813042	1813042001	Kuripan	68,33
14	Pesisir Tengah	1813012	1813012004	Rawas	68,01
15	Way Krui	1813072	1813072007	Labuhan Mandi	67,98
16	Pesisir Utara	1813042	1813042005	Kota Karang	67,90
17	Way Krui	1813072	1813072009	Penggawa Lima	67,76
18	Pesisir Tengah	1813012	1813012001	Way Redak	67,74
19	Karya Peggawa	1813052	1813052005	Menyancang	67,51
20	Way Krui	1813072	1813072005	Ulu Krui	67,34
21	Way Krui	1813072	1813072010	Gunungkemala Timur	67,32
22	Pesisir Utara	1813042	1813042008	Kerbang Langgar	67,32
23	Pesisir Tengah	1813012	1813012002	Serai	67,31
24	Pesisir Tengah	1813012	1813012006	Suka Negara	67,15
25	Pesisir Utara	1813042	1813042006	Balam	67,06
26	Pesisir Selatan	1813022	1813022001	Negeri Ratu Tenumbang	66,98
27	Pesisir Selatan	1813022	1813022008	Biha	66,86
28	Pesisir Selatan	1813022	1813022002	Sukarame	66,58
29	Pesisir Tengah	1813012	1813012007	Pahmungan	66,37

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM
30	Ngambur	1813092	1813092003	Negeri Ratu Ngambur	65,96
31	Lemong	1813032	1813032009	Bandar Pugung	65,58
32	Way Krui	1813072	1813072006	Gunung Kemala	65,46
33	Pesisir Selatan	1813022	1813022007	Tanjung Setia	65,42
34	Pesisir Selatan	1813022	1813022011	Tanjung Raya	65,39
35	Pesisir Selatan	1813022	1813022010	Marang	65,30
36	Krui Selatan	1813082	1813082007	Pemerihan	65,29
37	Pesisir Selatan	1813022	1813022014	Paku Negara	65,15
38	Pesisir Utara	1813042	1813042003	Negeri Ratu	65,13
39	Karya Penggawa	1813052	1813052008	Penggawa V Tengah	65,07
40	Pesisir Utara	1813042	1813042002	Padang Rindu	65,06
41	Krui Selatan	1813082	1813082008	Mandiri Sejati	64,82
42	Ngambur	1813092	1813092007	Suka Negara	64,76
43	Ngambur	1813092	1813092004	Pekon Mon	64,45
44	Ngambur	1813092	1813092006	Suka Banjar	64,19
45	Lemong	1813032	1813032003	Way Batang	64,11
46	Ngaras	1813102	1813102019	Sukarame	64,07
47	Way Krui	1813072	1813072008	Suka Baru	63,87
48	Pesisir Utara	1813042	1813042012	Gedau	63,68
49	Krui Selatan	1813082	1813082005	Lintik	63,55
50	Krui Selatan	1813082	1813082009	Padang Raya	63,40
51	Ngambur	1813092	1813092009	Bumi Ratu	63,29
52	Pulaupisang	1813062	1813062004	Pekon Lok	63,24
53	Ngambur	1813092	1813092002	Ulok Mukti	63,08
54	Bangkunat	1813112	1813112009	Suka Negeri	62,89
55	Pulaupisang	1813062	1813062002	Labuhan	62,75
56	Pulaupisang	1813062	1813062001	Pasar Pulaupisang	62,74
57	Karya Penggawa	1813052	1813052006	Laay	62,71
58	Krui Selatan	1813082	1813082006	Walur	62,61
59	Pesisir Selatan	1813022	1813022012	Bangun Negara	62,44

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM
60	Pesisir Utara	1813042	1813042010	Batu Raja	62,39
61	Pesisir Utara	1813042	1813042007	Way Narta	62,28
62	Lemong	1813032	1813032002	Tanjung Sakti	62,11
63	Krui Selatan	1813082	1813082002	Way Suluh	61,49
64	Krui Selatan	1813082	1813082004	Padang Haluan	61,37
65	Ngaras	1813102	1813102006	Pardasuka	61,21
66	Ngambur	1813092	1813092005	Gedung Cahya Kuningan	60,90
67	Pesisir Utara	1813042	1813042004	Kerbang Dalam	60,89
68	Krui Selatan	1813082	1813082010	Suka Jadi	60,83
69	Ngaras	1813102	1813102017	Padang Alam	60,55
70	Bangkunat	1813112	1813112005	Penyandingan	60,21
71	Karya Penggawa	1813052	1813052004	Penengahan	60,16
72	Ngaras	1813102	1813102020	Bandar Jaya	60,04
73	Pesisir Selatan	1813022	1813022009	Way Jambu	59,83
74	Pesisir Utara	1813042	1813042009	Walur	59,58
75	Karya Penggawa	1813052	1813052001	Kebuayan	59,38
76	Karya Penggawa	1813052	1813052002	Way Nukak	59,15
77	Pesisir Selatan	1813022	1813022004	Sumur Jaya	59,14
78	Pulaupisang	1813062	1813062005	Sukadana	59,02
79	Lemong	1813032	1813032004	Lemong	58,87
80	Karya Penggawa	1813052	1813052012	Asahan Way Sindi	58,82
81	Pulaupisang	1813062	1813062003	Bandar Dalam	58,67
82	Lemong	1813032	1813032001	Tanjung Jati	58,22
83	Pesisir Selatan	1813022	1813022003	Pelita Jaya	57,65
84	Karya Penggawa	1813052	1813052011	Way Sindi Hanuan	57,48
85	Pesisir Utara	1813042	1813042011	Pemancar	57,45
86	Lemong	1813032	1813032010	Penengahan	57,40
87	Karya Penggawa	1813052	1813052010	Tembakak Way Sindi	57,03
88	Lemong	1813032	1813032012	Sukamulya	56,97
89	Pulaupisang	1813062	1813062006	Suka Marga	56,74

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM
90	Ngaras	1813102	1813102003	Kota Batu	55,95
91	Krui Selatan	1813082	1813082001	Balai Kencana	55,54
92	Krui Selatan	1813082	1813082003	Way Napal	55,35
93	Bangkunat	1813112	1813112013	Tanjung Rejo	55,24
94	Lemong	1813032	1813032007	Bambang	54,79
95	Karya Penggawa	1813052	1813052009	Way Sindi Utara	54,73
96	Lemong	1813032	1813032011	Rata Agung	53,96
97	Lemong	1813032	1813032008	Pagar Dalam	53,27
98	Ngaras	1813102	1813102005	Rajabasa	52,91
99	Bangkunat	1813112	1813112014	Pagar Bukit Induk	52,78
100	Karya Penggawa	1813052	1813052003	Way Sindi	52,43
101	Bangkunat	1813112	1813112004	Kota Jawa	51,89
102	Pesisir Selatan	1813022	1813022015	Tulung Bamban	51,69
103	Bangkunat	1813112	1813112010	Sumberejo	51,19
104	Lemong	1813032	1813032006	Malaya	49,86
105	Lemong	1813032	1813032013	Parda Haga	48,57
106	Lemong	1813032	1813032005	Cahaya Negeri	48,21
107	Bangkunat	1813112	1813112008	Pemerihan	48,11
108	Ngaras	1813102	1813102018	Suka Maju	47,49
109	Bangkunat	1813112	1813112002	Tanjung Kemala	47,23
110	Karya Penggawa	1813052	1813052007	Penggawa V Ulu	46,74
111	Ngaras	1813102	1813102004	Mulang Maya	46,33
112	Bangkunat	1813112	1813112001	Pagar Bukit	45,95
113	Bangkunat	1813112	1813112003	Suka Marga	45,23
114	Bangkunat	1813112	1813112007	Way Haru	44,62
115	Bangkunat	1813112	1813112011	Siring Gading	44,09
116	Bangkunat	1813112	1813112012	Way Tias	43,01
117	Bangkunat	1813112	1813112006	Bandar Dalam	40,49
118	Ngaras	1813102	1813102001	Negeri Ratu Ngaras	37,47

3. SEBARAN PEKON RENTAN PANGAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN BERDASARKAN HASIL ANALISI PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
1	Pesisir Tengah	1813011	1813011005	Pasar Krui	1	5	6	4	6	5	74,58	1	6
2	Pesisir Tengah	1813011	1813011008	Pasar Kota Krui	1	3	6	4	6	5	70,70	8	6
3	Pesisir Tengah	1813012	1813012001	Way Redak	1	2	5	4	6	5	67,74	18	5
4	Pesisir Tengah	1813012	1813012002	Serai	1	1	6	4	6	4	67,31	23	5
5	Pesisir Tengah	1813012	1813012003	Kampung Jawa	1	2	6	4	6	5	68,59	12	5
6	Pesisir Tengah	1813012	1813012004	Rawas	1	1	6	4	6	5	68,01	14	5
7	Pesisir Tengah	1813012	1813012006	Suka Negara	1	3	5	4	6	2	67,15	24	5
8	Pesisir Tengah	1813012	1813012007	Pahmungan	1	2	5	4	6	4	66,37	29	5
9	Pesisir Selatan	1813022	1813022001	NR. Tenumbang	5	3	4	4	4	2	66,98	26	5
10	Pesisir Selatan	1813022	1813022002	Sukarame	5	3	5	4	4	2	66,58	28	5
11	Pesisir Selatan	1813022	1813022003	Pelita Jaya	5	3	5	4	5	1	57,65	83	4
12	Pesisir Selatan	1813022	1813022004	Sumur Jaya	5	3	5	4	5	1	59,14	77	4
13	Pesisir Selatan	1813022	1813022005	Tanjung Jati	6	3	4	4	5	4	71,71	5	6
14	Pesisir Selatan	1813022	1813022006	Pagar Dalam	6	3	6	4	5	1	68,82	11	5
15	Pesisir Selatan	1813022	1813022007	Tanjung Setia	3	3	6	4	5	1	65,42	33	5
16	Pesisir Selatan	1813022	1813022008	Biha	3	4	6	4	4	2	66,86	27	5
17	Pesisir Selatan	1813022	1813022009	Way Jambu	6	1	5	4	4	1	59,83	73	4
18	Pesisir Selatan	1813022	1813022010	Marang	5	1	6	4	4	1	65,30	35	5
19	Pesisir Selatan	1813022	1813022011	Tanjung Raya	6	1	3	4	5	1	65,39	34	5
20	Pesisir Selatan	1813022	1813022012	Bangun Negara	5	1	6	4	4	1	62,44	59	4
21	Pesisir Selatan	1813022	1813022013	Ulok Manik	6	4	5	4	5	1	71,61	6	6
22	Pesisir Selatan	1813022	1813022014	Paku Negara	6	2	5	4	4	1	65,15	37	5
23	Pesisir Selatan	1813022	1813022015	Tulung Bamban	4	2	4	4	5	1	51,69	102	3
24	Lemong	1813032	1813032001	Tanjung Jati	5	5	1	4	4	1	58,22	82	4
25	Lemong	1813032	1813032002	Tanjung Sakti	6	4	4	4	5	1	62,11	62	4
26	Lemong	1813032	1813032003	Way Batang	3	4	5	4	4	1	64,11	45	5

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
27	Lemong	1813032	1813032004	Lemong	2	3	3	4	4	1	58,87	79	4
28	Lemong	1813032	1813032005	Cahaya Negeri	3	5	2	4	3	1	48,21	106	3
29	Lemong	1813032	1813032006	Malaya	3	3	3	4	5	1	49,86	104	3
30	Lemong	1813032	1813032007	Bambang	3	5	2	4	4	1	54,79	94	4
31	Lemong	1813032	1813032008	Pagar Dalam	3	3	5	4	4	1	53,27	97	3
32	Lemong	1813032	1813032009	Bandar Pugung	2	5	3	4	5	1	65,58	31	5
33	Lemong	1813032	1813032010	Penengahan	2	5	3	4	4	1	57,40	86	4
34	Lemong	1813032	1813032011	Rata Agung	1	3	5	4	4	1	53,96	96	4
35	Lemong	1813032	1813032012	Sukamulya	1	6	3	4	3	1	56,97	88	4
36	Lemong	1813032	1813032013	Parda Haga	3	4	3	4	3	1	48,57	105	3
37	Pesisir Utara	1813042	1813042001	Kuripan	3	6	5	4	3	3	68,33	13	5
38	Pesisir Utara	1813042	1813042002	Padang Rindu	1	5	5	4	4	2	65,06	40	5
39	Pesisir Utara	1813042	1813042003	Negeri Ratu	4	4	5	4	3	4	65,13	38	5
40	Pesisir Utara	1813042	1813042004	Kerbang Dalam	5	4	1	4	3	3	60,89	67	4
41	Pesisir Utara	1813042	1813042005	Kota Karang	5	5	3	4	3	3	67,90	16	5
42	Pesisir Utara	1813042	1813042006	Balam	6	4	4	4	3	3	67,06	25	5
43	Pesisir Utara	1813042	1813042007	Way Narta	6	4	1	4	2	3	62,28	61	4
44	Pesisir Utara	1813042	1813042008	Kerbang Langgar	6	4	2	4	3	2	67,32	22	5
45	Pesisir Utara	1813042	1813042009	Walur	4	4	5	4	3	1	59,58	74	4
46	Pesisir Utara	1813042	1813042010	Batu Raja	6	3	3	4	4	1	62,39	60	4
47	Pesisir Utara	1813042	1813042011	Pemancar	5	3	2	4	2	1	57,45	85	4
48	Pesisir Utara	1813042	1813042012	Gedau	6	6	3	4	1	2	63,68	48	4
49	Karya Penggawa	1813052	1813052001	Kebuayan	4	2	5	4	4	1	59,38	75	4
50	Karya Penggawa	1813052	1813052002	Way Nukak	4	3	5	4	3	1	59,15	76	4
51	Karya Penggawa	1813052	1813052003	Way Sindi	2	1	3	4	4	1	52,43	100	3
52	Karya Penggawa	1813052	1813052004	Penengahan	2	3	5	4	3	1	60,16	71	4
53	Karya Penggawa	1813052	1813052005	Menyancang	4	4	6	4	3	3	67,51	19	5
54	Karya Penggawa	1813052	1813052006	Laay	3	4	6	4	3	1	62,71	57	4

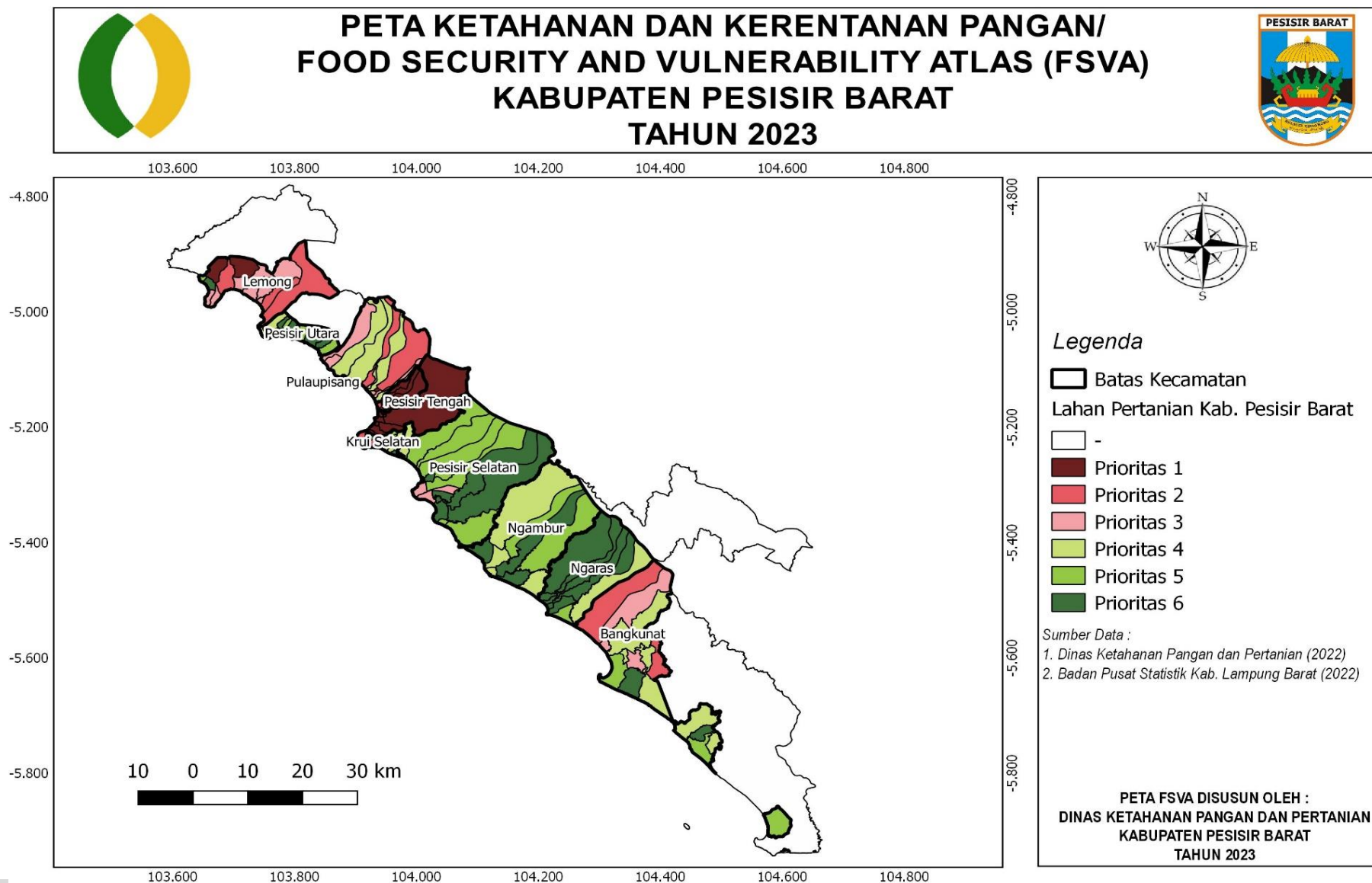
No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
55	Karya Penggawa	1813052	1813052007	Penggawa V Ulu	1	3	6	4	3	1	46,74	110	3
56	Karya Penggawa	1813052	1813052008	Penggawa V Tengah	3	4	6	4	3	2	65,07	39	5
57	Karya Penggawa	1813052	1813052009	Way Sindi Utara	3	3	5	4	3	1	54,73	95	4
58	Karya Penggawa	1813052	1813052010	Tembakak Way Sindi	4	4	5	4	3	1	57,03	87	4
59	Karya Penggawa	1813052	1813052011	Way Sindi Hanuan	4	4	4	4	4	1	57,48	84	4
60	Karya Penggawa	1813052	1813052012	Asahan Way Sindi	3	3	2	4	3	2	58,82	80	4
61	Pulaupisang	1813062	1813062001	Pasar Pulaupisang	1	3	1	4	5	3	62,74	56	4
62	Pulaupisang	1813062	1813062002	Labuhan	1	4	2	4	5	2	62,75	55	4
63	Pulaupisang	1813062	1813062003	Bandar Dalam	1	1	5	4	4	3	58,67	81	4
64	Pulaupisang	1813062	1813062004	Pekon Lok	1	1	5	4	5	3	63,24	52	4
65	Pulaupisang	1813062	1813062005	Sukadana	1	2	2	4	4	2	59,02	78	4
66	Pulaupisang	1813062	1813062006	Suka Marga	1	1	5	4	4	2	56,74	89	4
67	Way Krui	1813072	1813072001	Pajar Bulan	1	3	5	4	6	4	68,91	10	5
68	Way Krui	1813072	1813072002	Bumi Waras	2	4	5	4	6	4	71,91	4	6
69	Way Krui	1813072	1813072003	Banjar Agung	2	4	3	4	6	5	69,06	9	5
70	Way Krui	1813072	1813072004	Penggawa V Ilir	2	4	6	4	6	2	70,89	7	6
71	Way Krui	1813072	1813072005	Ulu Krui	1	3	3	4	6	4	67,34	20	5
72	Way Krui	1813072	1813072006	Gunung Kemala	1	2	3	4	6	4	65,46	32	5
73	Way Krui	1813072	1813072007	Labuhan Mandi	1	3	3	4	6	4	67,98	15	5
74	Way Krui	1813072	1813072008	Suka Baru	1	3	2	4	6	2	63,87	47	5
75	Way Krui	1813072	1813072009	Penggawa Lima	2	4	2	4	6	4	67,76	17	5
76	Way Krui	1813072	1813072010	Gunung kemala Timur	1	4	4	4	6	2	67,32	21	5
77	Krui Selatan	1813082	1813082001	Balai Kencana	4	1	5	4	1	4	55,54	91	4
78	Krui Selatan	1813082	1813082002	Way Suluh	5	3	5	4	2	4	61,49	63	4
79	Krui Selatan	1813082	1813082003	Way Napal	4	2	3	4	1	4	55,35	92	4
80	Krui Selatan	1813082	1813082004	Padang Haluan	3	2	6	4	2	5	61,37	64	4

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
81	Krui Selatan	1813082	1813082005	Lintik	2	4	5	4	3	5	63,55	49	4
82	Krui Selatan	1813082	1813082006	Walur	2	4	5	4	2	4	62,61	58	4
83	Krui Selatan	1813082	1813082007	Pemerihan	6	4	6	4	1	3	65,29	36	5
84	Krui Selatan	1813082	1813082008	Mandiri Sejati	6	5	5	4	1	3	64,82	41	5
85	Krui Selatan	1813082	1813082009	Padang Raya	5	4	5	4	2	4	63,40	50	4
86	Krui Selatan	1813082	1813082010	Suka Jadi	3	3	5	4	3	4	60,83	68	4
87	Ngambur	1813092	1813092001	Sumber Agung	6	4	6	4	4	3	73,30	2	6
88	Ngambur	1813092	1813092002	Ulok Mukti	4	1	5	4	4	3	63,08	53	4
89	Ngambur	1813092	1813092003	NR. Ngambur	4	2	6	4	4	3	65,96	30	5
90	Ngambur	1813092	1813092004	Pekon Mon	6	1	4	4	4	1	64,45	43	5
91	Ngambur	1813092	1813092005	Gedung Cahya Kuningan	4	4	5	4	4	1	60,90	66	4
92	Ngambur	1813092	1813092006	Suka Banjar	5	3	4	4	4	2	64,19	44	5
93	Ngambur	1813092	1813092007	Suka Negara	6	2	5	4	4	1	64,76	42	5
94	Ngambur	1813092	1813092008	Muara Tembulih	4	5	5	4	5	3	72,32	3	6
95	Ngambur	1813092	1813092009	Bumi Ratu	5	3	4	4	4	1	63,29	51	4
96	Ngaras	1813102	1813102001	Negeri Ratu Ngaras	6	3	1	4	1	1	37,47	118	2
97	Ngaras	1813102	1813102003	Kota Batu	6	4	3	4	1	1	55,95	90	4
98	Ngaras	1813102	1813102004	Mulang Maya	6	4	3	4	1	1	46,33	111	3
99	Ngaras	1813102	1813102005	Rajabasa	6	2	4	4	2	1	52,91	98	3
100	Ngaras	1813102	1813102006	Pardasuka	6	2	5	4	1	1	61,21	65	4
101	Ngaras	1813102	1813102017	Padang Alam	6	3	4	4	3	1	60,55	69	4
102	Ngaras	1813102	1813102018	Suka Maju	4	3	6	4	1	1	47,49	108	3
103	Ngaras	1813102	1813102019	Sukarame	5	3	5	4	3	2	64,07	46	5
104	Ngaras	1813102	1813102020	Bandar Jaya	3	6	5	4	2	1	60,04	72	4
105	Bangkunat	1813112	1813112001	Pagar Bukit	2	2	5	4	4	1	45,95	112	3
106	Bangkunat	1813112	1813112002	Tanjung Kemala	4	4	1	4	4	1	47,23	109	3
107	Bangkunat	1813112	1813112003	Suka Marga	4	2	3	4	3	1	45,23	113	2

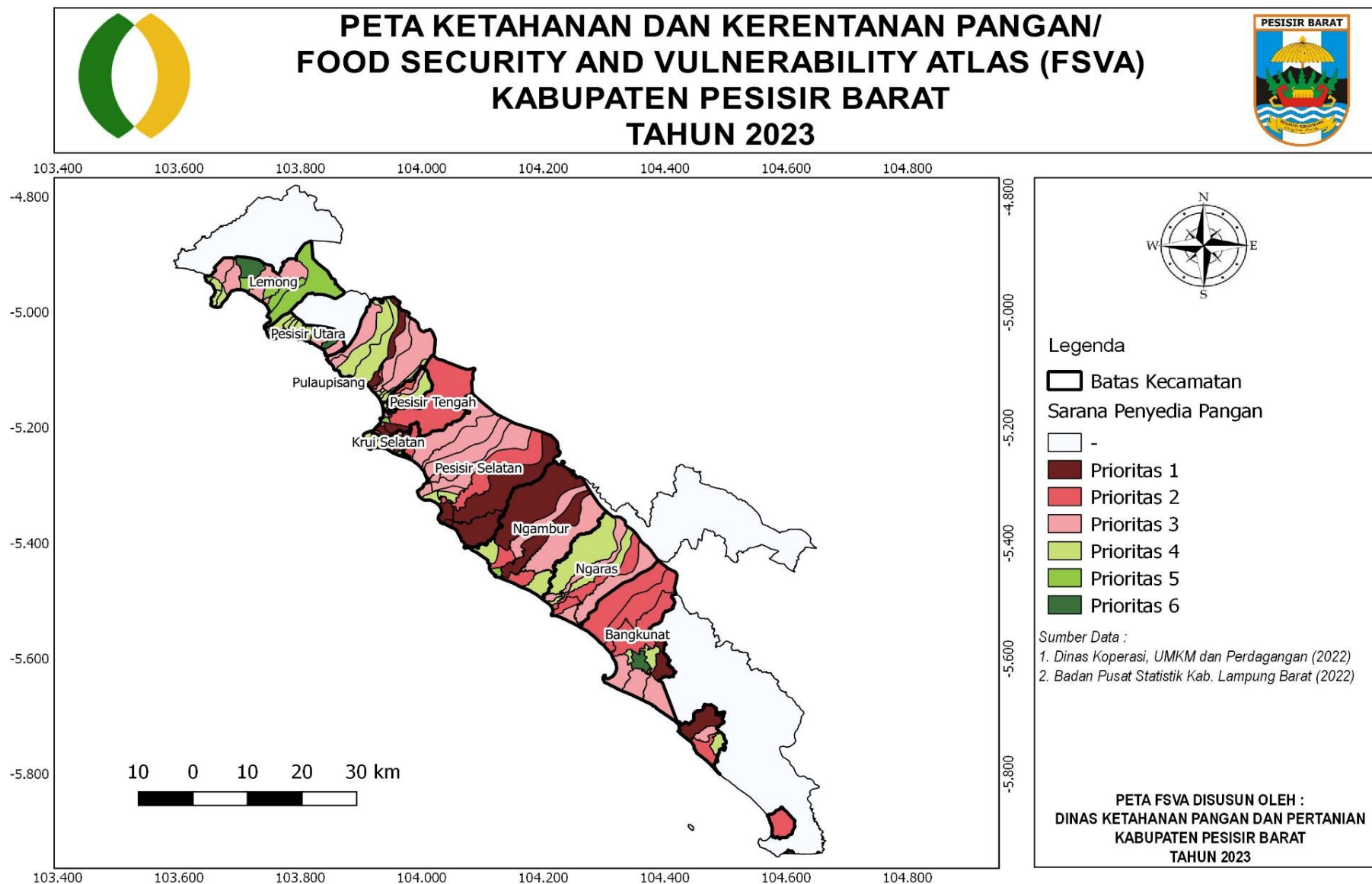
No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.No Water	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERING KAT	PRIO KOMP
108	Bangkunat	1813112	1813112004	Kota Jawa	5	3	3	4	4	1	51,89	101	3
109	Bangkunat	1813112	1813112005	Penyandingan	3	6	5	4	4	1	60,21	70	4
110	Bangkunat	1813112	1813112006	Bandar Dalam	4	1	1	2	3	1	40,49	117	2
111	Bangkunat	1813112	1813112007	Way Haru	5	2	1	2	3	1	44,62	114	2
112	Bangkunat	1813112	1813112008	Pemerihan	2	1	3	4	4	1	48,11	107	3
113	Bangkunat	1813112	1813112009	Suka Negeri	6	3	1	4	4	1	62,89	54	4
114	Bangkunat	1813112	1813112010	Sumberejo	4	3	3	4	5	1	51,19	103	3
115	Bangkunat	1813112	1813112011	Siring Gading	4	4	1	2	3	1	44,09	115	2
116	Bangkunat	1813112	1813112012	Way Tias	6	3	1	2	2	1	43,01	116	2
117	Bangkunat	1813112	1813112013	Tanjung Rejo	3	2	3	4	4	1	55,24	93	4
118	Bangkunat	1813112	1813112014	Pagar Bukit Induk	4	4	3	4	4	1	52,78	99	3

4. Peta FSVA Kabupaten Pesisir Barat

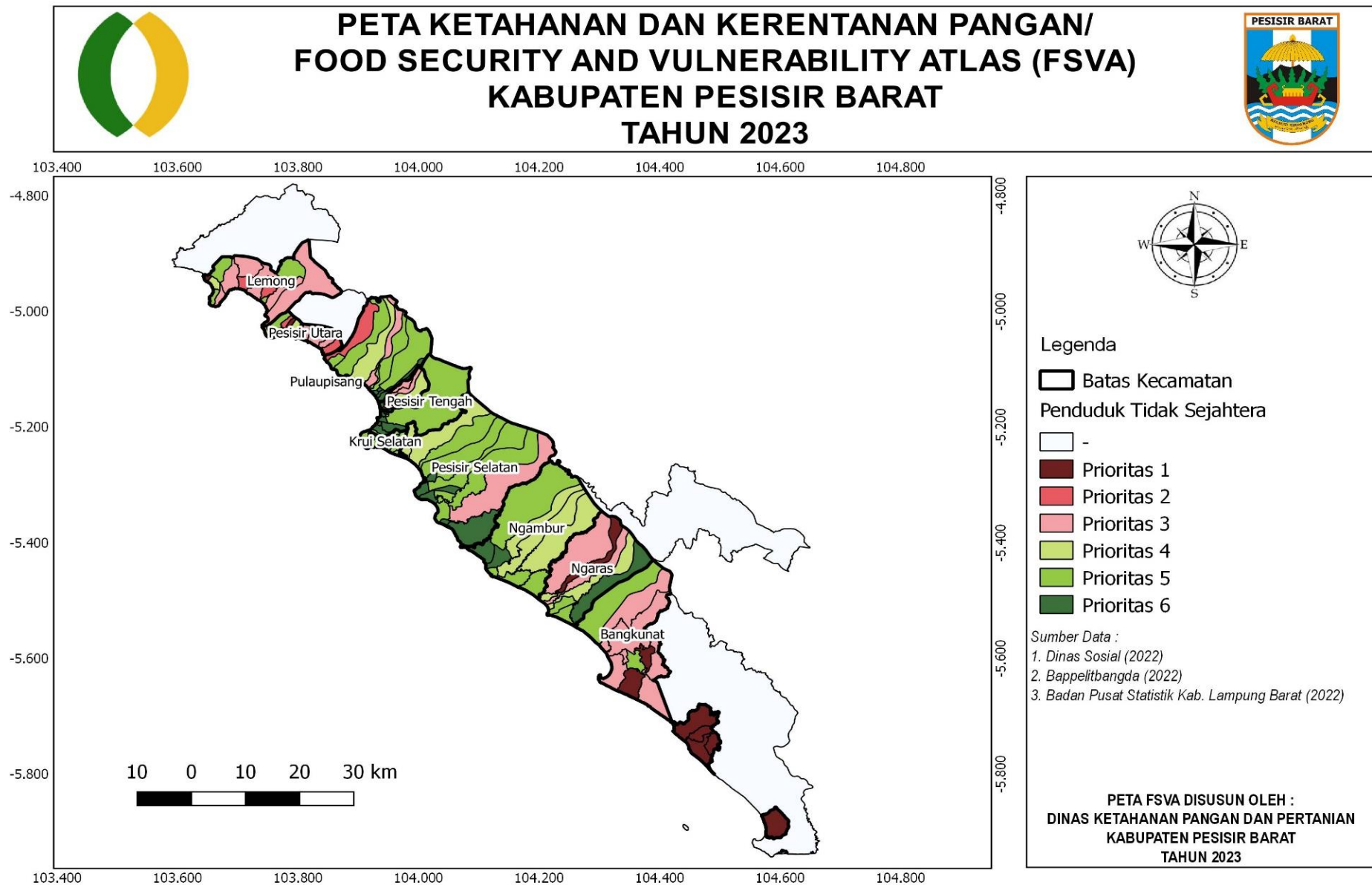
A. Peta Indikator Luas Baku Lahan Pertanian



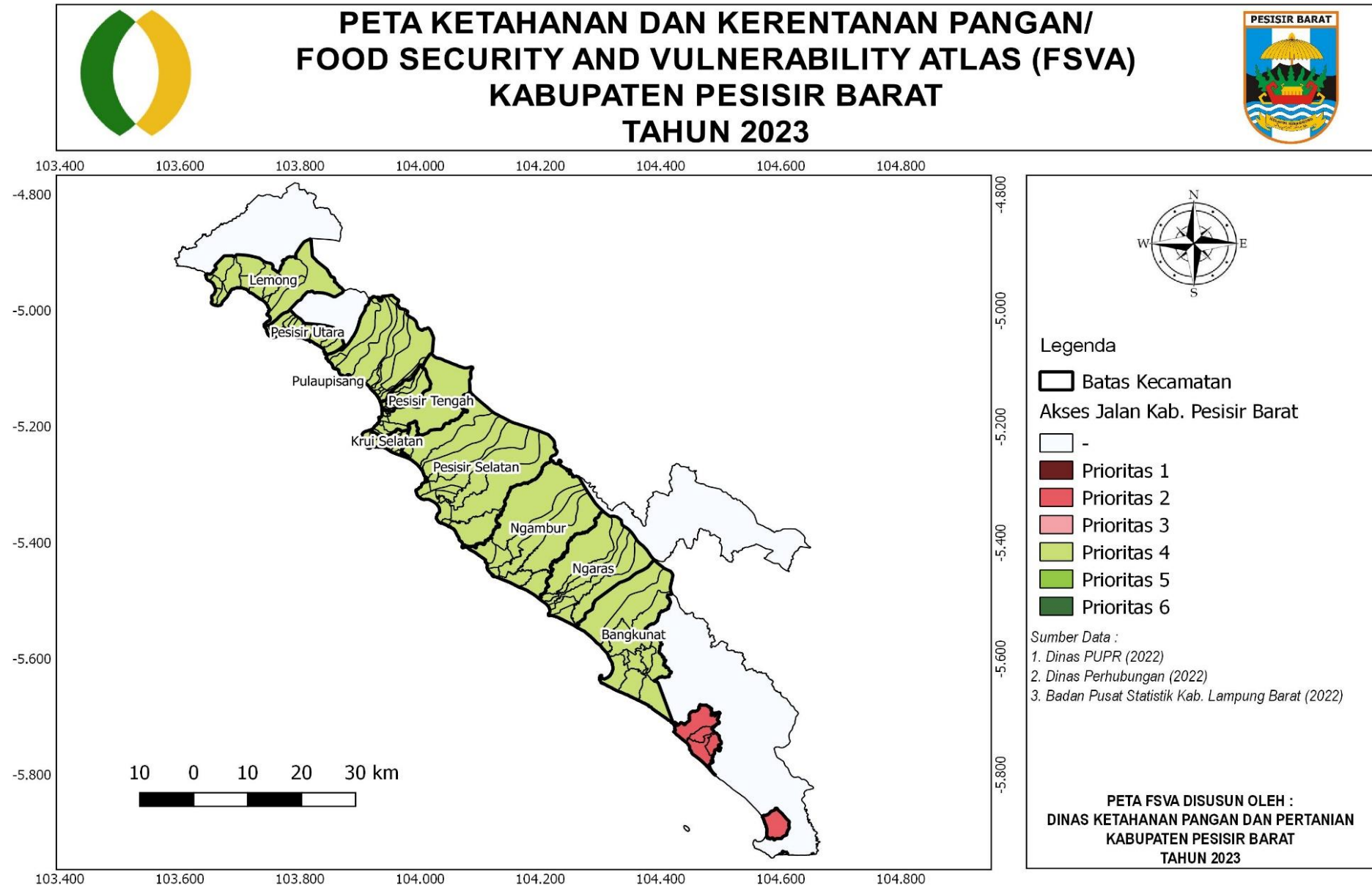
B. Peta Indikator Sarana Penyedia Pangan



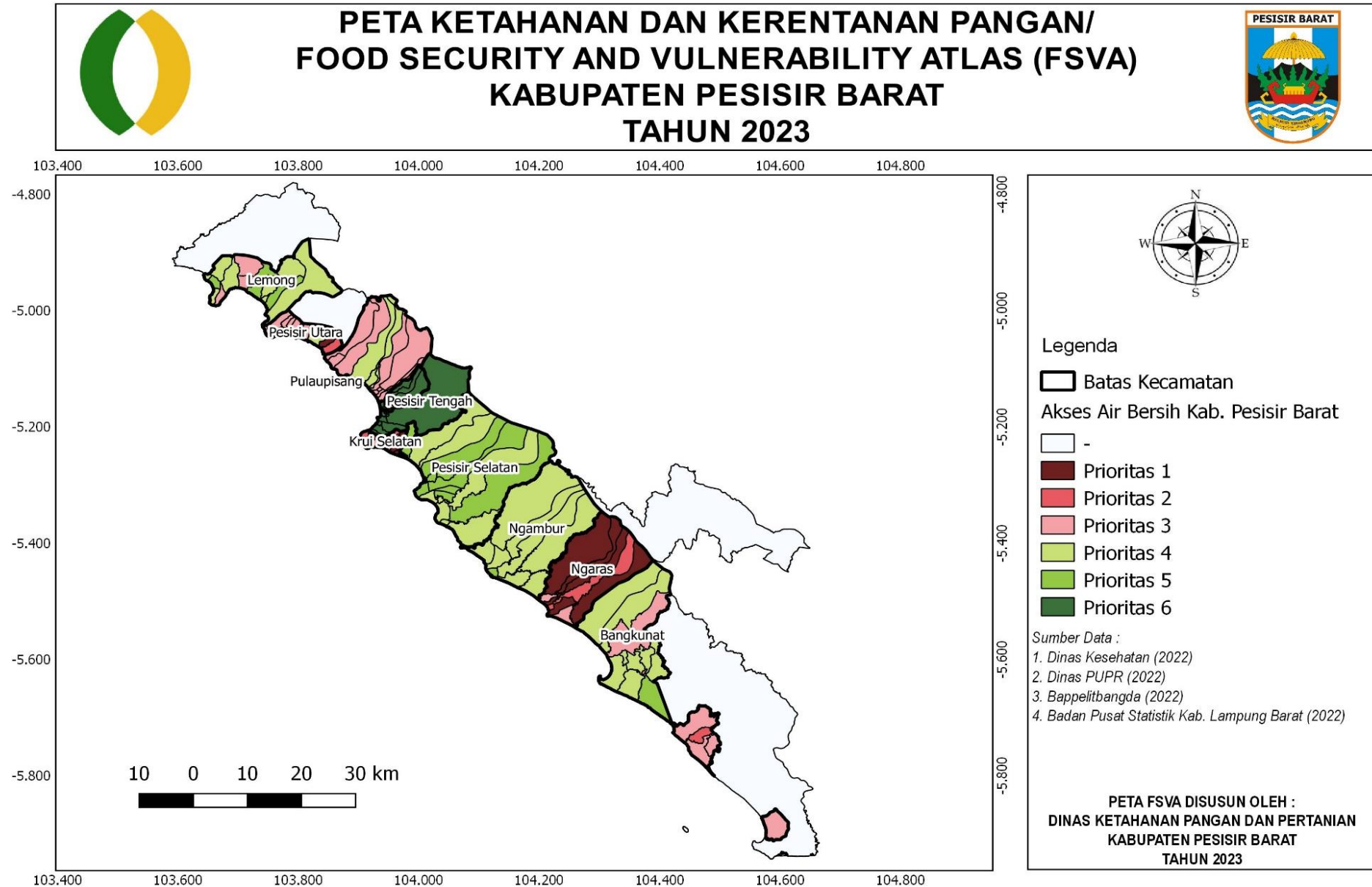
C. Peta Indikator Tingkat Kesejahteraan Penduduk



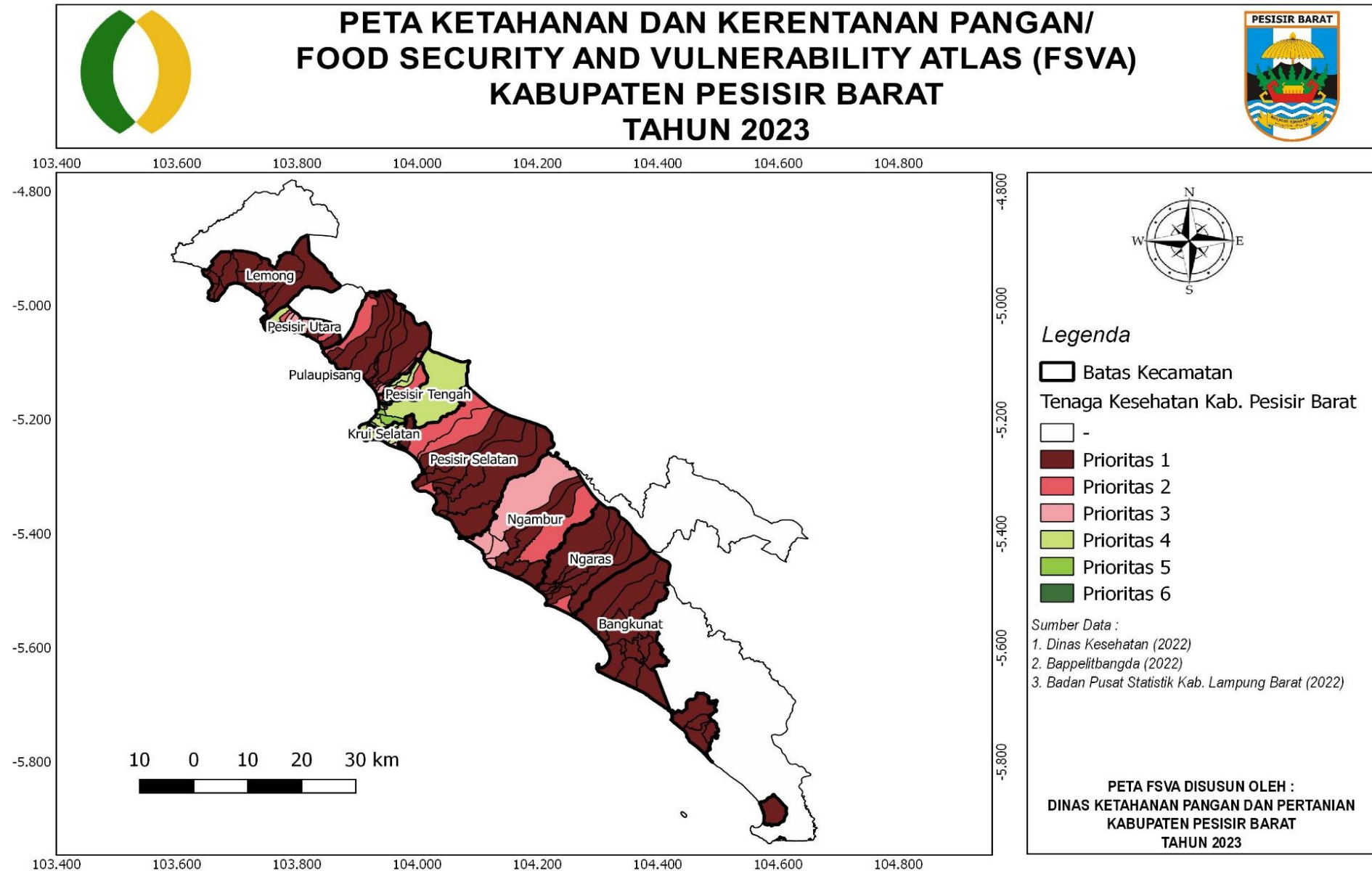
D. Peta Indikator Jalan Penghubung



E. Peta Indikator Akses Air Bersih



F. Peta Indikator Tenaga Kesehatan



G. Peta Indikator Komposit

